



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENEGAKAN HUKUM OLEH PATROLI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LABUHAN BATU

SKRIPSI



ENDRIANSYAH DALIMUNTHE
05 140 001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PATROLI KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESORT LABUHAN BATU**

(Endriansyah Dalimunthe, 05 140 001, Fakultas Hukum Unand, 59 hal, 2010)

ABSTRAK

Masyarakat yang mengalami modernisasi menuju masyarakat yang kompleks pada umumnya menumbuhkan ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat sehingga mendorong individu untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain jika terdapat ketidaksesuaian dan kesengajaan antara ambisi dan kemampuan pribadi maka hal ini akan mendorong orang untuk melakukan tindak pidana. Walaupun peraturan perundang-undangan tentang perjudian mengatur sanksi yang tegas, namun kenyataannya dilapangan kegiatan perjudian baik dalam skala kecil dan besar dapat disaksikan ditengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang dalam tugas pokok nya melaksanakan patroli yang bertujuan untuk mencegah adanya niat dan kesempatan terjadi nya tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang marak terjadi hingga saat ini. Permasalahan perjudian ini perlu di kaji karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan social dan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana penegakan hukum oleh Patroli Kepolisian Resort Labuhanbatu terhadap tindak pidana perjudian, bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan Patroli di Kepolisian Resort Labuhan batu, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan Patroli di Kepolisian Resort Labuhanbatu. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum oleh patroli Kepolisian Resort Labuhanbatu, tindakan-tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patrol dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan patroli. Metode Penelitaian yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pihak kepolisian Resort labuhan batu melakukan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian dengan menggunakan pola preventif dimana upaya yang bersifat preventif bertujuan untuk pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja kepolisian melalui operasi-operasi seperti patroli, tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patroli di Kepolisian Resort labuhanbatu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan patroli adalah faktor cuaca, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah personel, serta perundangan yang tidak mengatur batas minimal hukuman sehingga dalam praktek peradilan majelis hakim memberikan putusan yang sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku judi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PATROLI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU”**. Adapun skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk mengarahkan semua kemampuan penulis miliki untuk mencoba mencapai maksud substansi daripada permasalahannya. Tetapi dalam menguraikan berkemungkinan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Abdullah Asman Dalimunthe, SE dan Ibunda Erni Elizar Pane, Spd yang telah mengasihi penulis dengan doa dan cinta kasihnya selama ini, dan seluruh keluarga yang tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Selanjutnya dengan segala hormat ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Elwi Daniel, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang :
 - a. Bapak Yoserwan, SH. MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Bapak Ilhamdi Taufik, SH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- c. Bapak Rembrandt, SH. MPd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak DR. Ismansyah, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak H. A. Irzal Rias, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 4. Bapak DR. Ismansyah, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 5. Ibu Efren Nova, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 7. Bapak dan Ibu Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 8. Bapak Kompol Imam Sadar B, SH, SiK selaku Waka Polres Labuhanbatu dan Iptu A. H. Siregar selaku Kaur Bin Ops Sat Reserse Kriminal Polres Labuhanbatu.
 9. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Amin

Padang, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
F. Metode penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum.....	18
B. Tinjauan umum Tentang Patroli Polisi.....	27
C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	37
D. Pengaturan dan Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Resort Labuhanbatu Terhadap Tindak Pidana Perjudian.....	45
B. Tindakan-tindakan Yang Dilakukan Selama Pelaksanaan Patroli di Kepolisian Resort Labuhanbatu.....	50
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Patroli di Kepolisian Resort Labuhanbatu.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat yang sedang mengalami modernisasi menuju masyarakat yang kompleks pada umumnya menumbuhkan ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan penumbuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan harta-harta mewah, tanpa mempunyai untuk mencapainya dengan jalan wajar dapat mendorong individu untuk melakukan tindak pidana. Dengan kata lain jika terdapat ketidaksesuaian dan kesenjangan antara ambisi dengan kemampuan pribadi. Hal itu mendorong untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya Anton tabah menyatakan bahwa :

Perkembangan ancaman dan tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di penghujung abad ke-20 sangatlah pesat mengikuti kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia. Hal ini telah membawa tugas-tugas dan pekerjaan kepolisian di seluruh dunia menjadi semakin kompleks, memandang kepolisian untuk mengembangkan tugas-tugas spesialisasi untuk menunjang tingkat profesionalismenya. Namun demikian peningkatan spesialisasi pada fungsi kepolisian tidak mengurangi frekuensi tugas patrol polisi. Bahkan di Negara-negara maju yang memiliki pasukan polisi dan kelengkapan teknologi yang semakin modern seperti Amerika Serikat tetap menempatkan patroli kepolisian tetap sebagai kegiatan yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan mutu pelayanan polisi¹.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan peran polisi sebagai

institusi yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan

¹ Anton Tabah, 2001, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.37

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugas pokoknya polisi melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan patroli terhadap kegiatan masyarakat, pemerintah sesuai kebutuhan. Yang mana setiap kegiatan tersebut termasuk patroli diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Tugas dan tindakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum dibagi atas :

1. Tindakan Preventif yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian sebelum terjadinya tindak pidana untuk pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut. Tindakan preventif terdiri dari:
 - a. Preventif aktif
Disini polisi bersifat aktif misalnya dengan melakukan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
 - b. Preventif pasif
Disini polisi hanya menunggu laporan dan pengaduan misalnya penjagaan di kantor kepolisian.
2. Tindakan Represif yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian setelah terjadinya tindak pidana yaitu dengan jalan memproses setiap perkara yang diajukan kepolisian.
3. Tindakan Preemtif yaitu tindakan kepolisian yang diupayakan sebagai pendidikan dan pembinaan yang ditujukan kepada segenap lapisan masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana.

Dalam kepolisian juga dikenal istilah Samapta yang merupakan salah satu fungsi operasional polri yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan. Patroli merupakan salah satu tugas penting yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya menimalisir adanya niat dan kesempatan tindak pidana. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Kepolisian. "Patroli adalah salah satu bentuk kegiatan operasional polri yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna sehingga benar-benar menghilangkan faktor atau mencegah bertemunya niat dan kesempatan"².

Untuk melaksanakan patroli maka pihak kepolisian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya antara lain Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol:SKEP/249/IV/2004 tanggal 21 april 2004 tentang buku petunjuk kegiatan patroli.

Patroli kepolisian selain yang dilakukan oleh fungsi samapta juga dilakukan oleh fungsi kepolisian lalu lintas. Yang mana kedua fungsi kepolisian tersebut merupakan pelayanan dan penegakan hukum oleh kepolisian. Yang diharapkan dapat meminimkan angka kriminalitas khususnya dalam tindak pidana perjudian. Namun dalam kenyataanya belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi misalnya dari polisi sendiri yang menganggap patroli tersebut

² "Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan", Mabes Polri, Lembaga diklat, Jakarta 27 April 2001, hlm 92

kurang penting dan yang penting adalah upaya-upaya represif. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan tugas sehari-hari dimana patroli belum dilengkapi sarana prasarana yang belum cukup seperti jumlah kendaraan yang belum memadai. Contohnya bagian samapta memiliki dua mobil dan tiga sepeda motor. Sedangkan unit laka lantas hanya memiliki 3 mobil dan empat sepeda motor.

Dari uraian diatas jelas bahwa kepolisian dalam melaksanakan tugas patroli diharapkan dapat membawa pengaruh. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Resort Labuhanbatu.**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dijelaskan tersebut maka ditariklah beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk dibahas lebih dalam. Dalam penulisan ini maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh patroli Kepolisian Resort Labuhan Batu terhadap tindak pidana Perjudian?
2. Bagaimanakah tindakan-tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patroli di Kepolisian Resort Labuhan Batu?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan patroli di kepolisian Resort Labuhan Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah yang ada, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh patroli di Kepolisian Resort Labuhan Batu terhadap tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patroli di Kepolisian Resort Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam melakukan patroli di Kepolisian Resort Labuhan Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi atau literatur bagi para pembaca, aparat penegak hukum khususnya polisi dan masyarakat dalam menambah wawasannya tentang penegakan hukum oleh patroli kepolisian terhadap perkembangan tindak pidana perjudian.
2. Dapat bermanfaat bagi para penegak hukum khususnya polisi agar lebih mengutamakan upaya preventif khususnya patroli dalam rangka menimalisir adanya niat dan kesempatan melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1 Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum didalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Kalau kata-katanya yang asli didalam bahasa belanda disalin kedalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya” Perlu juga diperhatikan bahwa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata peristiwa karena dengan istilah *feit* itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan³.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu meyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazelwinkel-suringa, ”jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.

Asas legalitas juga mengandung pengertian bahwa setiap tindakan kepolisian yang dalam hal ini Satuan samapta dan lalu lintas harus didasarkan pada undang-undang/peraturan perundang-undangan⁴ jika tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan maka tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap tidak sah atau melawan hukum

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 39.

⁴ Sebagaimana di kutip oleh Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 62.

meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana. Dalam pengaruh patroli polisi terhadap perkembangan tindak pidana perjudian setiap tindakan pencegahan tindak pidana perjudian yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, yang dalam hal ini satuan samapta dan lalu lintas harus didasarkan kepada peraturan-perundangan.

1.2 Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3c Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap."⁵

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan represif polisi yang dalam hal ini Satuan Samapta dan Lalu Lintas dalam menindak pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian harus tetap berpedoman bahwa seseorang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Disamping itu asas ini juga menekankan bahwa polisi yang dalam hal ini Satuan Samapta dan Lalu Lintas selaku aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan terhadap pelaku tindak pidana, jangan sampai nantinya tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 12.

melanggar hak asasi seseorang yang belum terbukti dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

1.3 Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan

Penegakan hukum adalah merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup. Penegakan hukum didalam penanggulangan kejahatan memiliki Fungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Fungsi penegakan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum.⁶ Sistem penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah sistem penegakan hukum yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 70.

untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Sistem penegakan hukum yang dimaksud adalah sistem penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Tujuan akhir dari penanggulangan kejahatan ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peranan pihak Kepolisian yang dalam hal ini Satuan Samapta dan lalu lintas dalam perkembangan tindak pidana perjudian adalah dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban umum dan ketertiban sosial ditengah-tengah masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.

2.2 Pengertian Patroli Secara Umum

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pengertian tentang Kepolisian

sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Police means the organize body of civil officers in a city, town, or district, whose particular duties are the preservation of good order, the prevention and detection of crime and the enforcement of the laws⁷

Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 1982. memberikan 2 pengertian tentang istilah Polisi:

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb) dan
2. Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).

Lain halnya menurut Encyclopedia and Social Science memberikan pengertian "Polisi sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum"⁸.

Pengertian Polisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengertian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal penanggulangan pengaruh patroli

⁷

. 05 April 2009 Pukul 22.00 Wib.

⁸ Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit*, hlm. 7.

polisi terhadap perkembangan tindak pidana perjudian, Kepolisian memiliki satuan khusus yang bernama Satuan Samapta dan Lalu Lintas.

2.3 Pengertian Patroli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 1982 pengertian Patroli yaitu ronda oleh tentara atau oleh polisi untuk meneliti keamanan atau mencari musuh.

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, bahwa pengertian patroli adalah salah satu bentuk kegiatan operasional yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat atau mencegah bertemunya niat dan kesempatan.

Patroli Kepolisian selain yang dilakukan oleh fungsi Samapta juga dilakukan oleh fungsi kepolisian Lalu Lintas, yang mana kedua fungsi kepolisian tersebut merupakan tulang punggung pelayanan dan penegakan hukum oleh kepolisian.

2.4 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 1982. tindak pidana mengandung arti perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

Sedangkan para ahli memberikan beberapa pengertian tentang tindak pidana diantaranya :

1. Simon

"Peristiwa pidana adalah perbuatan melawah hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab"⁹

2. Vos

"Memberikan definisi yang singkat tentang strafbaarfeit adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana"¹⁰.

3. Wirjono Projodikoro

"Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".

4. Moeljatno

"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Pengertian tindak pidana menurut penelitian ini adalah pengertian tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Yang Diterbitkan Oleh Balai Pustaka Pada Tahun 2007.

2.5 Pengertian Perjudian

⁹ Neng Sarmida, Aria Zurneti Dan Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, hlm 11

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaraan dan kebiasaan permaianan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainnya.

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan teruhannya kepada si pemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini dan melengkapi bahan-bahan atau data konkrit, jawaban yang objektif ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka penulis akan melakukan penelitian sebagai berikut.

1. Sifat Penelitian

Beranjak dari judul maka sifat penelitiannya adalah penelitian deskripsi yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap

suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis atau penelitian hukum non doktrinal.¹²

3. Penentuan Sumber Data

Dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis maka data yang diperlukan disamping data sekunder juga data primer.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Data Primer

Data primer dapat diperoleh melalui:

1. Dengan jalan melakukan wawancara atau interview.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui Tanya jawab secara lisan antara pewawancara dan responden. Adapun tipe wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan polisi yang melakukan patroli dan pelaku tindak pidana perjudian yaitu:

1. Dua orang Polisi Samapta.
2. Dua orang Polisi lalu Lintas.
3. Dua orang pelaku tindak pidana perjudian.

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35

¹² *Ibid*, hlm.102

Metode sampling yang dilakukan melalui sampel, penggunaan sampel ini mempunyai tujuan atau dilakukan dengan cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat memiliki karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

b. Data Sekunder

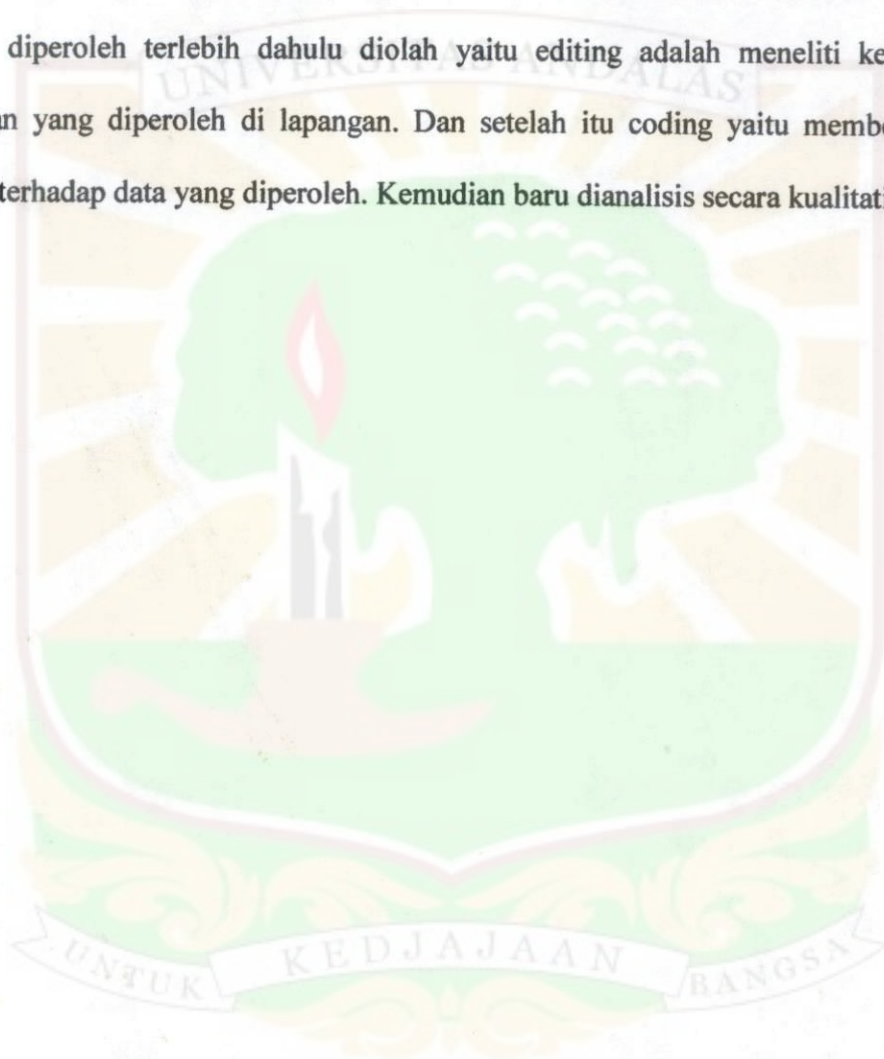
Data sekunder dapat diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: undang-Undang Dasar 1945. Peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri serta Peraturan Daerah. Diantaranya : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya:
 - a. Hasil penelitian.
 - b. Teori hukum dan pendapat sarjana.

Selain dari data primer dan data sekunder penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisa secara kualitatif dimana data yang diperoleh terlebih dahulu diolah yaitu editing adalah meneliti kembali catatan yang diperoleh di lapangan. Dan setelah itu coding yaitu memberikan kode terhadap data yang diperoleh. Kemudian baru dianalisis secara kualitatif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Pertumbuhan dan kemajuan perkembangan bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meningkatnya arus informasi sangat banyak mempengaruhi peningkatan dan bentuk kejahatan yang terjadi, sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara tuntas dan berlanjut.

Peningkatan upaya penegakan hukum yang telah kita laksanakan selama ini selalu berpacu dengan kecepatan dan bentuk baru kejahatan yang terjadi. Menghadapi peningkatan kejahatan dan modus operandi kejahatan tersebut, maka tindakan penegakan hukum dituntut untuk makin lebih cermat, tepat dan tuntas, sehingga setiap penegakan hukum memiliki efektivitas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi.¹³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksudkan di atas,

¹³Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 63

dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks, tanpa adanya organisasi tersebut (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Keempat elemen tersebut di atas merupakan instrumen hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum, karena itu harus dapat menjalin hubungan kerjasama untuk dapat dikatakan *integrated criminal justice system*.¹⁴

Pendapat lain dikemukakan oleh Raharjo, yang menjelaskan bahwa “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan hukum yang dimaksud disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu”.¹⁵ Sedangkan menurut Suharto yang dikutip Salam menyebutkan bahwa “penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat”.¹⁶

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yaitu upaya penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Sedangkan secara represif yaitu upaya penegak hukum melakukan

¹⁴Riza Nizalli, *op. cit*, hal. 3

¹⁵M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2003, hal. 14 dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun

¹⁶Suharto dalam buku M. Said Saile, *Ibid*, hal.15 dikutip dari R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*, Gagas mitracatur Gemilang, Jakarta, 1997

tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum terus dilakukan Polri dan menurut Kunarto tindakan pencegahan yang dilakukan Polri terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

1. mengatur, artinya membuat proses, kegiatan dan interaksi masyarakat menjadi tertib;
2. menjaga, artinya mengkondisikan agar masyarakat dengan semua miliknya selalu dalam keadaan aman dan bebas ancaman serta gangguan pihak-pihak lain;
3. mengawal, artinya mengamankan khusus obyek-obyek pengamanan bergerak dengan cara mengikuti fisik;
4. patroli, artinya melakukan perondaan;

Sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu penindakan.¹⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang sangat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor

¹⁷ *Ibid.* hal. 33 dikutip dari Kunarto, Tri Bata, Catur Prasetya: *Sejarah Perspektif dan Prospeknya*, Cipta manunggal, Jakarta

tersebut. Menurut Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi oleh undang-undang saja;

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat berasal dari undang-undang, yang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, masalah peranan ini lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi adalah menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8

hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Upaya untuk melakukan penegakan hukum, dituntut adanya penegak hukum. Penegak hukum merupakan anggota masyarakat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum. Soekanto menyatakan bahwa “penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam penegakan hukum yang meliputi kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.”¹⁹

Titik sentral keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada kualitas profesionalitas aparat penegak hukum, seperti penyidik (Polri dan PPNS), jaksa dan

¹⁹*Ibid*, hal. 19

hakim. Dan penyidik Polri merupakan aparat penegak hukum yang pertama menangani perkara tindak pidana.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang terdapat pada pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1))

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 ayat (1))

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. (Pasal 15 ayat (2))

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 16 ayat (1))

Tindakan lain yang dimaksud di atur dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia. (Pasal 16 ayat (2))

B. Tinjauan Umum Tentang Patroli polisi

1. Pengertian Patroli Polisi

Ada beberapa pengertian tentang patroli polisi menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan . “Patroli adalah salah satu kegiatan bentuk kegiatan operasional polri yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna sehingga menghilangkan faktor niat atau mencegah bertemunya niat dan kesempatan²⁰. Pendapat Richard L.Holomb pakar kepolisian dari Amerika Serikat menyatakan sebagai berikut *“Police Patrol in the back home of crime prevention and law enforcement”*²¹ (patroli polisi merupakan tulang punggung dalam pencegahan terjadinya tindak pidana dan penegakan hukum).

Sementara itu Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat pengertian tentang patroli sebagai berikut: “Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota samapta

²⁰ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, op cit, hlm 92

²¹ Pendapat Richard L.Holomb seperti dikutip Anton Tabah dalam bukunya tahun, 2001, Patroli Polisi, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm 4

polri guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat”²²

2. Sifat, Asas, Rute, Bentuk dan Peranan Patroli Polisi

Sebelum membahas lebih lanjut tentang sifat, asas, rute, bentuk dan peranan polisi perlu lebih diketahui dulu bahwa untuk mewujudkan penampilan yang positif setiap petugas patroli harus memiliki 6 sikap yang harus dimiliki dan dihayati yaitu²³.

1. Berseri

Setiap petugas patroli harus selalu tampil berseri dan berpenampilan simpati, tegap, penuh semangat dan energik, tidak berjenggot atau berjambang dan rambut serta kumis tertata rapi.

2. Etis

Selalu santun dan sopan baik dalam bertutur kata maupun dalam sikap perilaku, namun tetap tegas dan bertindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

3. Rendah hati

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seorang petugas patroli (patrolman) tidak menunjukkan sikap sombong, sewenang-wenang, apalagi tindakan berlebihan (over acting) tetapi senantiasa rendah hati dan

²² Anton Tabah, loc.cit

²³ Anton Tabah, op.cit, hlm 43

penuh cinta kasih dengan sesame, sehingga benar-benar tampil sebagai pengayoman yang menyejukkan hati masyarakat.

4. Rapi

Selalu tampil bersih dan rapi. Seperti ketentuan seragam polri termasuk segala atribut dan kelengkapan peralatannya.

5. Ramah

Senantiasa tampil dengan sikap ramah, bersahabat sehingga masyarakat tidak memiliki rasa enggan apalagi takut untuk berhadapan dengan polisi, baik dalam wujud partisipasi maupun dalam rangka minta pengayoman.

6. Responsif

Petugas patroli harus memiliki sikap polisi sejati, yaitu responsif (peka dan tanggap) terhadap apa yang terjadi di masyarakat apalagi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan kepolisian. Ini sesuai dengan doktrin kepolisian modern yaitu polisi yang pro-aktif, bukan polisi yang reaktif.

Ada tiga sifat patroli polisi yang pokok, yaitu patroli rutin, patroli insidentil dan patroli khusus (selektif)²⁴.

²⁴ Ibid, hlm 44

Dalam pelaksanaanya patroli polisi memiliki asas-asas²⁵.

a. Asas keterpaduan

Diantara fungsi-fungsi kepolisian yang melaksanakan patroli seperti samapta perlu ada kordinasi agar patroli lebih efektif. Apalagi polri dihadapkan dengan kekurangan personel yang cukup menonjol. Keterpaduan dan kordinasi seperti itu sangat diperlukan seperti saling tukar informasi terhadap sasaran maupun daerah rawan sehingga tidak saling berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pada akhirnya dapat mencapai sasaran patroli untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.

b. Asas selektif prioritas

Untuk membatasi keterbatasan personel dan sarana perlu diadakan selektifitas dan prioritas terhadap berbagai sasaran patroli yaitu berdasarkan tingkat kerawanan daerah.

c. Asas represif tingkat pertama

Petugas patroli kepolisian meskipun kewenangan diutamakan melakukan tindakan preventif, akan tetapi juga berhak melakukan tindakan represif bahkan menjadi wajib apabila menemukan tindak pidana.

Rute patroli selalu dimulai dari markas-markas kepolisian menuju sasaran-sasaran patroli yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian ada beberapa pedoman penentuan rute patroli yang baik yaitu²⁶:

²⁵ Ibid, hlm 40

1. Melalui tempat-tempat rawan tindak pidana
2. Melewati objek-objek dan proyek-proyek vital
3. Menyingahi pos-pos penjagaan keamanan

Adapun bentuk-bentuk patroli terbagi atas²⁷:

1. Patroli dalam kota
2. Patroli luar kota
3. Patroli di medan-medan khusus

Patroli kepolisian merupakan tulang punggung pelayanan dan pelaksana garis depan operasional kepolisian dalam mencegah segala bentuk kejahatan maupun timbulnya berbagai pelanggaran hukum. Peranan patroli kepolisian adalah²⁸.

1. Sebagai sarana komunikasi timbal balik dengan masyarakat sehingga pesan-pesan kamtibmas yang disampaikan semakin komunikatif.
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
3. Melindungi, mengayomi, melayani masyarakat sehingga patroli mampu merangsang partisipasi masyarakat dalam kamtibmas.
4. Berfungsi sebagai penyelidik dalam membantu pengungkapan tindak pidana

²⁶ Ibid, hlm 48

²⁷ Ibid, hlm 46

²⁸ Ibid, hlm 40

3. Tugas-Tugas Pokok Patroli Polisi

Adapun tugas-tugas patroli adalah²⁹. Mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat. Memelihara dan meningkatkan tertib dan kepatuhan hukum serta membina ketentraman masyarakat, menjaga keselamatan orang, harta benda, hak asasi termasuk memberi perlindungan dan pertolongan. Memelihara ketertiban, keteraturan dan keamanan umum. Memberikan pelayanan masyarakat, menerima laporan dan pengaduan masyarakat. Melakukan tindakan pertama terhadap peristiwa tertangkap tangan, tindakan hukum lainnya, menangani kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan lainnya dan pelanggaran hukum lalu lintas, melakukan tindakan pertama di TKP untuk kepentingan penyidikan. Memberi penerangan atau penyuluhan pada masyarakat guna merangsang partisipasinya terhadap kamtibmas, mencatat, mengumpulkan data dan informasi tentang apa yang dilihat, apa yang disaksikan dan apa yang dialami kemudian melaporkannya ke satuan tempat bertugas dalam bentuk laporan patroli, laporan polisi serta wajib membuat berita acara atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan di TKP.

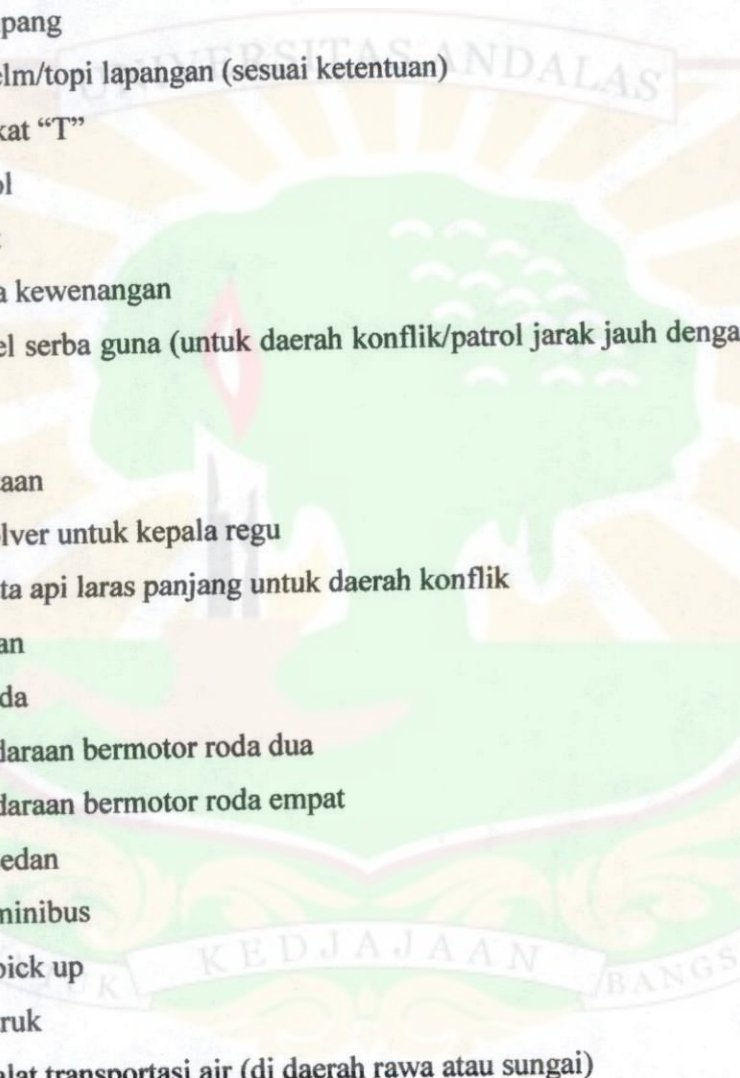
4. Peralatan dan Perlengkapan Patroli

Dalam melaksanakan tugas patroli setiap aparat kepolisian dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan antara lain:³⁰

1. Umum

²⁹ Ibid, hlm 39

³⁰ Buku petunjuk kegiatan patroli, No.Pol,SKEP/249/IV/2004, tanggal 21 April 2004, hlm 4

- 
- a. Seragam polisi yang berlaku sesuai ketentuan
 - b. Kelengkapan perorangan Samapta Polri terdiri dari:
 - 1. Sabuk Samapta
 - 2. Selempang
 - 3. Pet/helm/topi lapangan (sesuai ketentuan)
 - 4. Tongkat "T"
 - 5. Borgol
 - 6. Peluit
 - 7. Tanda kewenangan
 - 8. Ransel serba guna (untuk daerah konflik/patrol jarak jauh dengan berjalan kaki)
 - c. Persenjataan
 - 1. Revolver untuk kepala regu
 - 2. senjata api laras panjang untuk daerah konflik
 - d. Kendaraan
 - 1. Sepeda
 - 2. Kendaraan bermotor roda dua
 - 3. Kendaraan bermotor roda empat
 - a. sedan
 - b. minibus
 - c. pick up
 - d. truk
 - e. alat transportasi air (di daerah rawa atau sungai)
 - f. alat komunikasi
 - e. Perlengkapan mobil patroli
 - 1. perangkat pengeras suara
 - 2. lampu rotator
 - 3. publik address

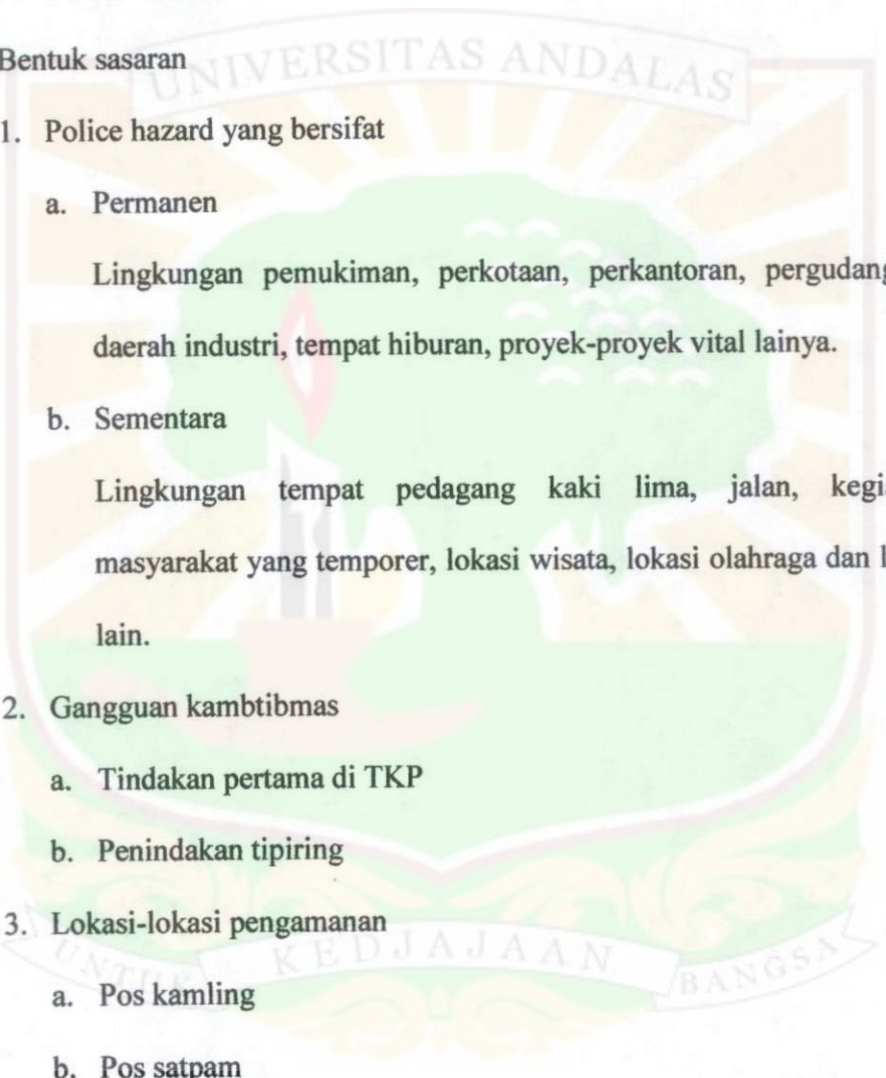
4. senter pengatur lalu lintas
5. PPPK
2. Khusus
 - a. Kendaraan taktis/kendaraan khusus untuk daerah konflik
 - b. Alat sistem posisi geografi

5. Tujuan dan Sasaran Patroli

Tujuan dan sasaran patroli adalah³¹:

1. Tujuan patroli
 - a. Penampakan kesiapsiagaan dan kehadiran polri ditengah-tengah masyarakat .
 - b. Pencegahan bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya kriminalitas.
 - c. Pencegahan terjadinya gangguan kambtibmas.
 - d. Pemberian rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat.
 - e. Diperolehnya informasi tentang kemungkinan timbulnya gangguan kambtibmas.
 - f. Pembatasan gerak provokator dan separatis ditengah masyarakat.
2. Sasaran patroli
 - a. Daerah sasaran
 1. Dalam kota
 2. Luar kota

³¹ Ibid, hlm 6

- 
3. Antar kota
 4. Daerah perairan
 5. Daerah konflik
 - b. Bentuk sasaran
 1. Police hazard yang bersifat
 - a. Permanen
Lingkungan pemukiman, perkotaan, perkantoran, pergudangan, daerah industri, tempat hiburan, proyek-proyek vital lainnya.
 - b. Sementara
Lingkungan tempat pedagang kaki lima, jalan, kegiatan masyarakat yang temporer, lokasi wisata, lokasi olahraga dan lain-lain.
 2. Gangguan kambtibmas
 - a. Tindakan pertama di TKP
 - b. Penindakan tipiring
 3. Lokasi-lokasi pengamanan
 - a. Pos kamling
 - b. Pos satpam

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Perjudian

Pengertian perjudian dapat kita lihat dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Dari rumusan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diuraikan menjadi dua pengertian perjudian, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan alat dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau keterlatihan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.³²

³² Drs. Adami Chazawi, S.H, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 166

Selanjutnya dua pengertian perjudian tersebut diperluas lagi pada dua macam pertaruhan, yaitu :

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, dimana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya, dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala hal manapun adalah termasuk perjudian. seperti permainan kuis untuk mendapat hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila telah mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.³³

Unsur-unsur tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut :

1. Adanya permainan
2. Adanya pertaruhan
3. Bersifat untung-untungan atau memerlukan keterampilan pemain
4. Tanpa izin dari pihak yang berwenang.

³³ Ibid hlm 167

Apabila suatu permainan memenuhi unsur-unsur tersebut maka permainan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai perjudian dan dapat dituntut di muka pengadilan.

D. Pengaturan Dan Jenis Tindak Pidana Perjudian

Pengaturan tindak pidana perjudian terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Ayat (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Ayat (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

2. Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Ayat (1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

Ke-1 Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303

Ke-2 Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat umum yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang

Ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-

pelanggaran ini, dapat dikenakan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1

Menyatakan bahwa semua tindakan pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

Ayat (1) Mengubah ancaman hukuman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ayat (2) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Ayat (3) Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah

menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Ayat (4) Mengubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

Ayat (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.

Ayat (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.

- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

Pasal 1

Ayat (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981,

Pasal 2

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Resort Labuhan Batu Terhadap Tindak Pidana Perjudian.

Perjudian merupakan salah satu perbuatan maksiat yang cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Kebanyakan pelaku tindak pidana perjudian bukan hanya mereka yang termasuk dalam golongan menengah keatas, akan tetapi banyak yang terdiri dari masyarakat golongan menengah kebawah, seperti pekerja atau buruh, pedagang-pedagang kecil, tukang becak, sopir, dan kuli-kuli yang berpenghasilan rendah.

Penghasilan yang sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga seringkali membuat orang mengambil jalan pintas tanpa usaha keras untuk memperoleh keuntungan dengan cara berjudi. Selain itu pelaku yang sudah ketagihan untuk berjudi cenderung menimbulkan tindak pidana lainnya yang menyebabkan stabilitas sosial masyarakat disekitarnya terganggu seperti perkelahian, pencurian, pemerasan, bahkan pembunuhan.³⁴

Pada tahun 2009 Kepolisian Resor Labuhanbatu melaksanakan Operasi atas dasar Surat Perintah Pelaksanaan : NO.POL : PRINLAK/01/II/2009 dengan nama

³⁴ Wawancara dengan Kasat Reserse Kriminal U.b.Kaur Bin Ops, Iptu A.H.Siregar tanggal 16 November 2009 Pukul 11.00 WIB

“Operasi Kepolisian Brantas Toba 2009”. Operasi ini bertujuan menekan angka kejahatan perjudian, narkoba, premanisme dan miras di wilayah hukum Resor Labuhanbatu.³⁵.

Operasi ini dilaksanakan oleh gabungan antara Sat Reskrim, Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Intelkam, Bag Binamitra. Operasi ini dilaksanakan selama 30 hari, dimulai pada tanggal 15 November 2009 Pukul 00.00 WIB s/d 14 Desember 2009 Pukul 00.00 WIB. Dalam Patroli dan Razia ini, Polisi sebagai Penyelidik mencari keterangan dan barang bukti guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Tindakan penyelidik tersebut antara lain memeriksa orang yang dianggap dicurigai dan melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Keseluruhan tindakan-tindakan tersebut harus patut dan masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, serta harus tetap menghormati Hak Asasi Manusia.

Setelah Operasi tersebut dilaksanakan, maka bagi para tersangka yang terjaring akan dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk diproses selanjutnya. Apabila dalam operasi ditemukan bukti permulaan yang cukup dan diindikasikan melanggar peraturan perundang-undangan pidana, maka kepolisian dalam hal ini Sat Reskrim

³⁵ Wawancara dengan Komisaris Polisi Imam Sadar , WAKA Polres Labuhanbatu tanggal 18 November 2009 Pukul 13.00 WIB

melaksanakan penindakan tegas serta penyidikan terhadap setiap tersangka guna diproses selanjutnya untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Bagi orang yang terjaring operasi dan dengan bukti permulaan tidak terbukti bersalah menurut peraturan perundang-undangan pidana, maka dilakukan tindak pemeriksaan dan pembinaan. Adapun proses tersebut antara lain adalah :³⁶

- a. Terhadap orang yang ditangkap dilakukan interogasi oleh penyidik dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain identitas tersangka, identitas yang menginterogasikan, dan kejadian atau tindakan apa yang dilakukan tersangka. Hasil interogasi akan dituangkan kedalam Berita Acara Interogasi yang ditanda tangani oleh yang diperiksa dan oleh penyidik yang menginterogasi.
- b. Melakukan Pembinaan yang merupakan prosedur yang harus dijalani bagi orang-orang yang terjaring operasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Bentuk pembinaannya antara lain memberikan pembinaan moral dan jiwa berupa nasehat, pengarahan oleh polisi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan bagi diri pribadi maupun orang lain. Hal ini dilakukan agar tersangka tersebut tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan memulai hal positif dan bermanfaat.

³⁶ Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi tris Zeviansyah, Kabag Bina Mitra Polres Labuhanbatu tanggal 24 November 2009 Pukul 14.00 WIB

- c. Setelah diinterogasi dan diberi pembinaan oleh Kepolisian, maka setiap orang yang terjaring dalam operasi dan dengan bukti permulaan tidak terbukti bersalah harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisikan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang sama, dan apabila melanggar janji yang telah dinyatakan maka orang tersebut bersedia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Tindakan selanjutnya adalah pengembalian orang-orang yang terjaring operasi dan tidak terbukti bersalah tersebut kepada pihak keluarga, bagi yang belum menikah akan dikembalikan kepada orang tua nya, sedangkan bagi yang telah menikah akan dipulangkan kembali kepada keluarga nya.

Berikut data yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Labuhanbatu berkaitan dengan Operasi Kepolisian Brantas Toba 2009 atas dasar Surat Perintah Pelaksanaan: No.Pol : PRINLAK/01/II/2009 yang dilaksanakan selama 30 hari dimulai pada tanggal 15 November 2009 Pukul 00.00 s/d 14 Desember 2009 Pukul 00.00 WIB

Tabel 1
Hasil Operasi Brantas Toba 2009

BULAN	TERJARING OPERASI	TERSANGKA	BARANG BUKTI	KETERANGAN
November	103 orang	45 orang	12 BB	15 orang SIDIK 10 orang BINA

Desember	38 orang	24 orang	5 BB	8 orang SIDIK 3 orang BINA
----------	----------	----------	------	-------------------------------

Pada bulan November 2009, Operasi Kepolisian Brantas Toba 2009 yang dilakukan dari tanggal 15 November 2009 sampai dengan 30 November 2009 setelah diakumulasikan maka terhitung 103 orang terjaring dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian sebanyak 45 orang yang dijadikan tersangka perjudian.

Pada bulan Desember 2009, Operasi Kepolisian Brantas Toba yang dilakukan tanggal 1 Desember 2009 s/d 14 Desember 2009 setelah diakumulasikan maka terhitung 38 orang terjaring dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian Resor Labuhanbatu maka sebanyak 24 orang yang dijadikan tersangka perjudian.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian sangat dibutuhkan peran serta masyarakat terutama berupa laporan atau pengaduan. Aparat kepolisian harus memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap laporan atau pengaduan dari masyarakat yang mengetahui telah terjadi nya praktek perjudian. Laporan atau pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Labuhanbatu atau dapat menghubungi melalui komunikasi lewat SMS pada setiap Satwil yang secara langsung dapat diakses oleh masyarakat.

Selain itu pihak Polres Labuhanbatu juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat

menghimbau masyarakat untuk pemberantasan perjudian seperti melaksanakan pawai anti togel (perjudian), dan ikrar akbar seluruh pelajar atau mahasiswa se-Labuhanbatu untuk tidak melakukan perjudian ikut memberantas perjudian.

B. Tindakan-tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patroli di kepolisian resort labuhan batu.

Sesuai dengan SKEP No.Pol : SKEP/IV/2004 Tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli maka tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patrol di Kepolisian Resort Labuhan Batu atau penerapan patrol nya adalah :

1. Tahap persiapan yang terdiri dari :
 - a. Mengecek kerapihan seragam polisi dan sikap tampang.
 - b. Mengecek perlengkapan atau peralatan antara lain.
 - Senjata api
 - Borgol, tongkat "T"
 - Lampu senter
 - Kendaraan patroli
 - c. Mengecek admistrasi atau surat-surat :
 - Kartu tanda anggota
 - Buku catatan
 - Surat perintah
 - SIM, STNK
 - Blanko rencana kegiatan patroli
 - Blanko laporan patroli
 - d. Acara pimpinan pasukan :
 - Rute, sasaran patroli

- Cara bertindak
- Hal-hal khusus yang perlu

Dalam tahapan persiapan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pelaksanaan patroli di Polres Labuhanbatu mengacu pada peraturan yang berlaku.

2. Tahap Pelaksanaan

Secara umum setiap petugas unit patroli yang telah berada di lapangan harus melakukan tindakan sebagai berikut :

- Menjelajahi daerah dan rute yang telah di tentukan dan melihat kemungkinan adanya kerawanan.
- Mendatangi tempat-tempat penyelenggaraan keamanan swakarsa untuk koordinasi dan saling tukar menukar informasi yaitu dengan :
 - Pos-pos Kamling
 - Pos-pos Satpam
 - Pos-pos keamanan lainnya
- Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat yang bersifat situasional :
 - Keramaian
 - Pertunjukan
 - Kegiatan masyarakat lain nya
- Berkomunikasi dengan masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi petugas kepolisian.
- Memberikan perlindungan dan pengayoman yang diperlukan masyarakat.
- Memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran.

- g. Melakukan tindak pertama di TKP
- h. Melakukan tindakan represif tahap awal.
- i. Mencatat informasi yang didapat dikawasan patroli (dalam buku catatan patroli)
 - Yang diperoleh dari masyarakat
 - Yang ditemukan sendiri
- j. Melaporkan perkembangan situasi daerah patroli

Secara khusus pelaksanaan patroli disesuaikan dengan cara atau metode patroli yang dilakukan oleh masing-masing kepolisian sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Di kepolisian Resort Labuhan Batu terdiri dari patroli sepeda motor dan patroli bermobil.

3. Tahap Pengakhiran

Setiap unit patroli yang kembali dari melaksanakan tugas patrol maka tinakan selanjut nya adalah :

- a. Apel konsolidasi sekaligus melakukan pengecekan peralatan atau perlengkapan
- b. Melapor kepada kepala jaga tentang kedatangannya sekaligus melaporkan semua yang dilihat, didengar, dan dialami selama patroli serta kondisi anggota unit.
- c. Menyerahkan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan patroli.

- d. Menyerahkan hasil pelaksanaan patroli yang menyangkut penanganan tindakan pertama di TKP atau tindak pidana ringan (tahanan, barang bukti) dan lain-lain.

Menurut Kasat Samapta Bapak AKP R.Ritonga menyatakan bahwa : “Satu-satu nya Kepolisian Resort yang berada di lingkungan Kepolisian daerah Sumatera Utara yang telah membuat laporan tertulis hasil patroli adalah Kepolisian Resort Labuhanbatu. Yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi Polres Labuhanbatu dan dijadikan acuan dan pedoman bagi kepolisian-kepolisian lain di daerah Sumatera Utara”³⁷

Berbagai upaya tindakan pencegahan terhadap pelanggaran hukum terus dilakukan Polri dan menurut Kunarto tindakan pencegahan yang dilakukan Polri terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

- a. Mengatur

Upaya ini dilaksanakan dalam hal upaya agar masyarakat membuat proses atau menyuruh masyarakat melakukan sesuatu yang menimbulkan interaksi didalam masyarakat, sehingga menjadi tertib.

- b. Menjaga

³⁷ Wawancara dengan AKP, R.Ritonga, Kasat Samapta Polres Labuhanbatu tanggal 29 November 2009 Pukul 10.00 WIB

Upaya ini dilaksanakan dalam hal upaya mengkondisikan agar masyarakat dengan semua miliknya selalu dalam keadaan aman dan bebas ancaman serta gangguan dari pihak-pihak lain.

c. Mengawal

Upaya ini dilakukan dalam upaya mengamankan obyek-obyek pengamanan bergerak dengan cara mengikuti fisik.

d. Patroli

Dalam Patroli memiliki peranan sebagai salah satu bentuk kegiatan operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat atau mencegah bertemunya niat dan kesempatan.

Selama tahap pelaksanaan patroli tersebut, petugas patroli yang bekerja selalu mengadakan komunikasi dengan atasan yang berada di kantor kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Labuhanbatu. Yaitu melalui sarana telekomunikasi Handy Talky (HT), hal ini diperlukan apabila unit patroli yang bertugas menemukan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri.

Setiap laporan dari hasil pelaksanaan patroli bertujuan agar pimpinan mengetahui setiap hal yang didengar, dilihat dan didapati oleh setiap petugas patrol di lapangan dan dengan dasar tersebut dapat mengambil suatu kebijakan tertentu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di lapangan.

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Patroli di Kepolisian Resort Labuhanbatu

Dalam Kepolisian kekuatan patroli sebagai salah satu unit terbesar yang memegang peranan yang sangat penting. Unit ini bertanggung jawab penuh terhadap fungsi-fungsi kepolisian yang lain. Hal ini disebabkan karena unit patroli harus siap siaga selama 24 jam penuh. Dan ini sering mengambil alih tugas-tugas spesialisasi kepolisian dan baru kemudian perkara-perkara tersebut diserahkan kepada unit-unit spesialisasi yang telah ditentukan.

Apabila patroli dapat dilakukan dengan seefektif mungkin maka tentu akan mampu menekan angka kriminalitas yang terjadi. Tapi dalam pelaksanaannya patroli belum dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam hal ini yaitu :³⁸

1. Cuaca

Dalam setiap pelaksanaan tugas patroli faktor cuaca juga berpengaruh. Hal ini dapat kita lihat apabila cuaca dalam keadaan hujan maka tentu saja menyulitkan bagi petugas yang bekerja. Terutama bagi petugas yang bekerja. Terutama bagi petugas yang melaksanakan patroli dengan berjalan kaki, bersepeda, dan bersepeda motor.

2. Keterbatasan jumlah personel kepolisian yang bertugas melakukan patroli

³⁸ Wawancara dengan AKP, R.Ritonga, Kasat Samapta Polres Labuhanbatu tanggal 30 November 2009 Pukul 11.00 WIB

Dimana jumlah personel kepolisian yang belum sesuai dengan jumlah penduduk dan masyarakat yang akan diawasi. Hal ini dapat dilihat pada jumlah personel patroli dibagian samapta berjumlah 80 orang. Demikian juga dengan unit patroli yang dilakukan oleh fungsi lalu lintas yang mana personel keseluruhan sebanyak 58 orang.

3. Di bidang sarana dan prasarana patroli polisi masih sangat minim

Sebagai contoh satuan samapta memiliki dua mobil dan tiga sepeda motor. Padahal harus mengontrol area yang luas dan penduduk yang padat. Demikian juga unit lalu lintas hanya memiliki empat mobil dan enam sepeda motor. Dan terkadang petugas memakai kendaraan sendiri untuk melaksanakan patroli seperti : sepeda motor dengan bahan bakar milik pribadi pula. Demikian pula hal nya dengan anggaran BBM yang belum memadai dimana jatah BBM satu hari satu liter.

Begitu pula hal nya dengan peralatan komunikasi seperti : HT (Handy Talky) yang belum diperhatikan padahal peralatan ini sangat penting untuk efektifitas dan efisiensi tugasnya. Maka tak jarang pula para petugas kepolisian khusus nya unit patroli menggunakan sarana komunikasi milik sendiri seperti : hand phone pribadi.

4. Semangat dari petugas itu sendiri, karena dalam pelaksanaan tugas patroli mereka merasa bosan dengan tugas yang mereka lakukan selalu sama setiap hari.

5. selain itu kemampuan manajerial para komandan pada satuan-satuan patrol kepolisian juga perlu ditingkatkan, sehingga mampu mencari alternative dan inovatif untuk memecahkan berbagai permasalahan yang timbul.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu melakukan upaya pemberantasan tindakan pidana perjudian dengan menggunakan pola preventif. Upaya yang bersifat preventif bertujuan untuk pencegahan sebelum terjadi nya tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja kepolisian melalui operasi-operasi kepolisian seperti patroli. Namun demikian, pelaksanaan patroli polisi ikut memberi andil dalam mengurangi jumlah tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang terjadi. Karena memang sasaran patroli tersebut adalah meminimalisir adanya niat dan kesempatan berbuat jahat.
2. Adapun tindakan yang dilakukan selama pelaksanaan patroli adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/IV/2004 Tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli yaitu :
 - 1) Tahap persiapan yang terdiri dari mengecek seragam, peralatan, administrasi dan acara pimpinan pasukan.
 - 2) Tahap pelaksanaan

Secara umum setiap petugas unit patroli yang telah berada dilapangan harus melakukan tindakan antara lain menjelajahi daerah atau rute yang telah ditentukan, memberikan peringatan kepada warga yang lalai mengamankan harta benda nya, melakukan tindakan pertama di TKP dan lain-lain. Secara khusus disesuaikan dengan metode patrol yang dipakai di Kepolisian Resort Labuhanbatu yaitu patroli sepeda motor dan bermobil.

3) Tahap pengakhiran

Dalam tahap pengakhiran ini terdiri dari apel pengecekan peralatan, melapor tentang kedatangan petugas kepada kajaga, menyerahkan laporan hasil patroli

3. Namun dalam pelaksanaan patroli masih ditemukan beberapa kendala yang di hadapi seperti dalam pelaksanaan patroli terkendala oleh faktor cuaca yang kurang menguntungkan, keterbatasan jumlah personal kepolisian yang melaksanakan patroli. Dibidang sarana dan prasarana patroli polisi masih sangat minim misalnya jumlah mobil dan sepeda motor yang masih sangat sedikit jumlah nya, bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang diawasi. Demikian pula hal nya dengan Ht sebagai alat komunikasi, jatah BBM satu hari hanya satu liter, sehingga tak jarang petugas memakai sepeda motor, HP dan menambah BBM dari miliknya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut sampailah penulis pada beberapa saran yang penulis anggap patut untuk jadi perhatian bersama.

- 1 Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dengan pola preventif harus tetap dijalankan secara konsisten dan lebih digiatkan lagi agar dapat menindak tegas dan memberantas hingga ke akar-akar nay, sehingga dapat menekan angka kejahatan perjudian.
2. dedikasi dari petugas-petugas patroli polisi yang sudah baik perlu ditingkatkan motivasinya dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan latihan secara rutin dan dilaksanakan juga untuk anggota-anggota cadangan dan yang sedang bertugas sehingga ada kesinambungan informasi antara yang akan mengganti dan yang diganti.
3. Dan dalam pelaksanaan patroli petugas hendak nya dilengkapi dengan sarana dan prasarana komunikasi (minimal HT) guna efektifitas tugas nya dan melaporkan ke komandannya setiap situasi yang dihadapi dilapangan.
4. Patroli polisi yang dilaksanakan sepanjang waktu, apalagi malam hari yang relative rawan maka hendaknya satuan-satuan yang bertugas melakukan patroli tidak diganggu dengan adanya tugas-tugas fungsi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R, 1997, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, Jakarta
- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Dilapangan, Mabes Polri, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Jakarta 27 April 2001
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang, PAF, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato Dies UGm, Jogjakarta
- Poerwordarmita, WJS, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Neng Sarmida, Aria Zurneti Dan Nilma Suryani, 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- Soejono, 1996, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Tabah, Anton, 2001, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Skep Kapolri No. Pol : SKEP/180/III/2006, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri Di Lapangan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia (LNRI. TAHUN 2002 NOMOR 2)

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

C. Website

<http://www.Google.co.id/hl=Pengertian+perjudian>

<http://www.MabesPolri.co.id>

<http://www.Yahoo.co.id>



SURAT KETERANGAN
NO. POL. : SK / 15 / XII / 2009

Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu di Rantauprapat dengan ini menerangkan bahwa :

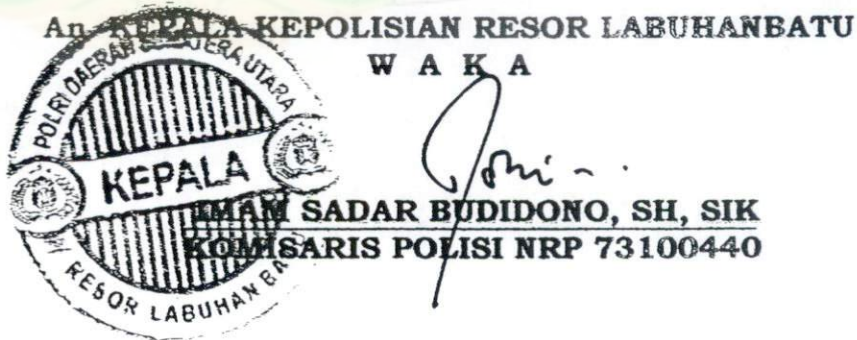
N a m a : ENDRIANSYAH DALIMUNTHER
No. BP : 05140001
Semester : IX (sembilan)
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas -- Padang tersebut, telah melaksanakan Penelitian / Riset di Polres Labuhanbatu dari tanggal 10 Oktober 2009 s/d 10 Desember 2009.

Surat Keterangan ini dibuat guna penyelesaian skripsi yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian pendidikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, sesuai dengan judul **“Penegakan Hukum oleh Patroli Kepolisian terhadap tindak pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di: Rantauprapat
Pada tanggal : Desember 2009



Att. MIN - RES

Tolong berikan Data Indeks pidana
Perjudian sejak tahun 2008 & 2009. kepada
Mahasiswa AN. ERDIANSYAH Polikamthe
Kepentingan penyusunan Skripsi.
Atas bantunya diucapkan terima kasih

Kawitien BS
H.A.H. Ames ar
29/7/09

" MEMO "

- TOLOMB BANTU INFORMASI yg DIPERLUKAN
OLEH MAHASISWA AN. ERDIANSYAH D.
- SUMA PENELITIAN DAN PEMBUATAN SKRIPSI
YOS.
- TRIMATI.

WAKA POLRES

IMAM SADAR B. SH. SiK.
KOMPOL NRP. 73100440



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

Nomor : B.070/831/WAS-BKPL/2009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Padang, 12 Juni 2009.

K e p a d a :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Utara
Cq. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
di -

Medan

Dengan hormat,

1. Memperhatikan surat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unand Padang Nomor : 882/H.16.4/PP-2009 tanggal 8 Juni 2009 yang dialamatkan kepada kami perihal mohon izin penelitian, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

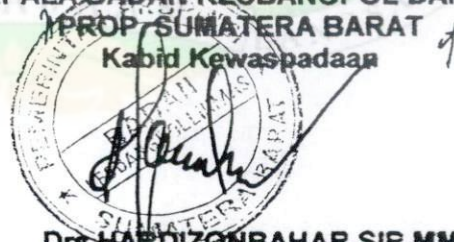
N a m a	: ENDRIANSYAH DALIMUNTHE
Tempat/Tgl.Lahir	: Rantau Prapat 26 Juni 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa
No.Kartu Identitas	: 05140001
Alamat	: Jl. Andalas I No.48 F. Padang
Lokasi/Tempat Penelitian	: Polres Labuhan Batu
Waktu/Lama Penelitian	: 10 Juni s/d 10 September 2009
Anggota	: -

2. Maksud dan tujuan melakukan Penelitian adalah untuk bahan pembuatan skripsi, guna menyelesaikan studinya ditingkat akhir dengan judul :

Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Wilayah Hukum Kepolisian Resrt Labuhan Batu
3. Pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.
4. Demikianlah untuk Bapak maklumi. atas kerja samanya di ucapkan terima kasih

Padang, 17 Juni 2009

AN. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROP. SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan



Drs. HARDIZONBAHAR, SIP. MM

Pembina Tk. I Nip.195804301981011001

Tembusan Kpd Yth. :

1. Bapak Mendagri Cq.Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg Laporan)
3. Sdr. Kepala Polres Labuhan Batu di Medan
4. Peringatan



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. WR. SUPRATMAN NO. 46, 48 TELP. (0624) 325704 – 21113 - 113
RANTAUPRAPAT

REKOMENDASI

Nomor : 070/579 / BKBPPM / 2009

Membaca : Surat Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 070-2476 / BKB. PM, tanggal Juli 2009, Perihal Surat Pemberitahuan Penelitian.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Sosial Politik No. 14 tahun 1981, tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri SD. 6 / 2 / 12, tanggal 5 Juli 1972, tentang Kegiatan Riset dan Survei, diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Memperhatikan : Hasil konsultasi dengan yang bersangkutan.

Perkenaan dengan hal tersebut diatas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Labuhanbatu :

MEMBERIKAN REKOMENDASI

kepada : **ENDRIANSYAH DALIMUNTHE**
nama : Jln. Andalas I Nomor 48 F Padang.
alamat : Mahasiswa
pekerjaan : Indonesia
kebangsaan :
Judul Penelitian : **" Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Labuhanbatu "**

Tempat Penelitian : Polres Labuhanbatu
Waktunya Penelitian : 10 Juni s/d 10 September 2009.
Peserta/Pengikut : Sendiri
Tanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
Saksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian

dan melakukan Penelitian dengan Ketentuan

Harus melaporkan kedatangannya kepada Dinas tempat Penelitian.

Tidak dibenarkan melakukan yang tidak sesuai dengan Judul yang dimaksud.

Mentaati dan mematuhi segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Menghindari diri dari perkataan, pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat menimbulkan SARA, menghina atau mendiskreditkan Bangsa dan Negara.

Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir sedang pelaksanaan belum selesai dapat diperpanjang kembali ke Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Labuhanbatu.

Apabila telah selesai melakukan kegiatan tersebut harus melapor / mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu c/q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

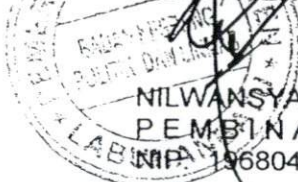
Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) Bulan, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan, apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan diatas maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Rantauprapat.

Pada Tanggal : 22 Juli 2009.-

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LABUHANBATU



NILWANSYAH, SH

PEMBAINA

NIP. 19680401 199703 1 004

Penyampaian
Bapak Bupati Labuhanbatu
(sebagai laporan)
Kepada Kesbang dan Linmas Propinsi
Sumatera Utara.
Ka. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu
Kapolres Labuhanbatu.

REKAPITULASI KASUS PERJUDIAN SAT RESKRIM
DAN POLSEK SEJAJARAN POLRES LABUHANBATU
PERIODE : TAHUN 2008 S/D JULI 2009

NO	TAHUN 2008				TAHUN 2009			KET
	BULAN	KSS	TSK		BULAN	KSS	TSK	
1.	JANUARI	7 KASUS	25 TSK		JANUARI	4 KASUS	15 TSK	
2.	PEBRUARI	6 KASUS	23 TSK		PEBRUARI	2 KASUS	6 TSK	
3.	MARET	7 KASUS	21 TSK		MARET	4 KASUS	22 TSK	
4.	APRIL	4 KASUS	14 TSK		APRIL	1 KASUS	6 TSK	
5.	MEI	2 KASUS	6 TSK		MEI	NIHIL	NIHIL	
6.	JUNI	1 KASUS	5 TSK		JUNI	22 KASUS	62 TSK	
7.	JULI	2 KASUS	5 TSK		JULI	6 KASUS	14 TSK	
8.	AGUSTUS	2 KASUS	8 TSK					
9.	SEPTEMBER	9 KASUS	29 TSK					
10.	OKTOBER	13 KASUS	42 TSK					
11.	NOPEMBER	1 KASUS	2 TSK					
12.	DESEMBER	1 KASUS	1 TSK					
JUMLAH		55 KASUS	181 TSK		JUMLAH	39 KASUS	125 TSK	

Rantauprapat, 04 Agustus 2009

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
KASAT RESERSE KRIMINAL
U.b. KAUR BIN OPS

A.H. SIREGAR
IPTU NRP 62030214



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail: fh_ua@yahoo.com

Nomor : 882 /H.16.4/PP-2009

8 Juni 2009

Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;
Bapak Kapolres Labuhan Batu
Sumatera Utara

di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: ENDRIANSYAH DALIMUNTHE
No. BP	: 05140001
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jln. Simpang Lintang Pasar Baru
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan dari tgl. 10 Juni s/d 10 September 2009
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Wilayah Hukum Kepolisian Resrt Labuhan Batu

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapakan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



SURAT PERINTAH PATROLI

NOMOR : SPP / 112 / II. / 2009 / SAMAPTA

DIPERINTAHKAN KEPADA :

1. Nama / Pangkat : 1. BRIPKA Z.BATU BARA
2. BRIPTU S. HARAHAH
3. BRIPTU DEDI CANDRA.S
2. Tempat kedudukan : POLRES LABUHANBATU
3. Route daerah - daerah yg di.
Patroli : Inti Kota Rantau Prapat, Bank Mandiri, Bank Sumut. BRI,
Bank BNI, Bank BII, Bank Danamon, Bank Mandiri Syariah,
Bank Mestika, Bank Sinar Mas, Bank Ekonomi, Perum
Pegadaian, PT.FIF.
4. Dalam Rangka Tugas : OPS RUTIN KEPOLISIAN
5. Tanggal Berangkat : 28 Februari 2009 Pukul 08.00 Wib.
6. Tanggal Kembali : 28 Februari 2009 Pukul 20.00 Wib.
7. Kendaraan : Sp.Motor
8. Senjata : SV 2
9. Keterangan dan Perintah. : Melaksanakan Perintah dengan penuh rasa tanggung jawab
dan melaporkan hasilnya Kepada Kapolres Labuhanbatu.

Dikeluarkan di : Rantauprapat.

Pada Tanggal : 28 Februari 2009

Yang di Perintahkan

Z.BATU BARA

BRIPKA NRP. 73060122

DAERAH SUMATERA
KEPOLISIAN RESORT LABUHAN BATU
SAMAPTA

KEPALA

RITONGA. SH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 62040737

Tembusan :

1. Kabag ops Polres Labuhan Batu
2. Kanit P3D Polres Labuhan Batu

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN TUGAS PATROLI R - 2

1. Waktu. : Hari : Sabtu
: Tanggal : 28 - Februari 2009
: Pukul : 08.00 / 20.00 WIB
2. Petugas : 1. Bripka 2. Batubara
: 2. Bripv 3. Harahap
: 3. Bripv 4. Dedi Chandra S.
: 4.
3. Dasar Penugasan : Surat Perintah Patroli No. Pol. : SPP / / II / 09 / Smt
: Tanggal, 28-02-09
4. Tugas yang dilaksanakan : Lubi Kota Rantau
Route / sasaran patroli
5. Uraian kejadian yang di temui : Aman tertib
Pada saat melaksanakan tugas :
6. Tindakan yang diambil : Insi
7. Saran- Saran dari Anggota : -
Yang melaksanakan Patroli Kepada
Kesatuan / Pimpinan setelah melaksanakan
Patroli.

Diketahui oleh
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
KASABAMA

R. RITONGA, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 62040737

Rantauprapat, 28 Februari 2009.
Pelapor.

2. BATUBARA
BRIKA NRP. 730017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480
Fax : (061) 4527480 Medan 20119

**SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN
(SPP)**

Nomor : 070 - 2476 / BKB.PM.

- MEMBACA** : Surat Kesbang Linmas Propinsi Sumatera Barat No. B070/839 tanggal 121 Juni 2009 tentang Permohonan Ijin Penelitian.
- MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1072 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor 14 tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan penelitian (SPP).
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061.1-436.K/Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang tugas pokok Fungsi dan Tata Kerja unsur-unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Utara.
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Penelitian Ybs.

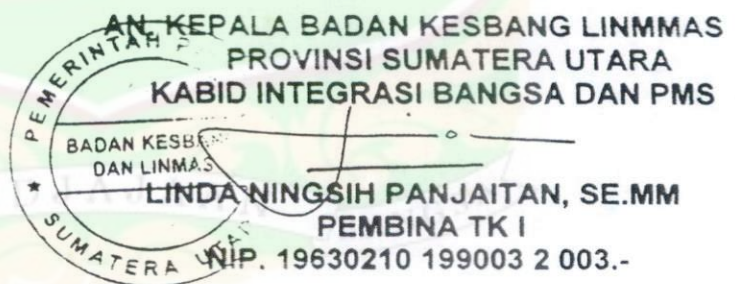
MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama** : Endriansyah Dalimunthe
- Alamat** : Jl. Andalas I Nomor 48 F Padang
- Pekerjaan** : Mahasiswa
- Kebangsaan** : Indonesia
- Judul Penelitian** : Penegakan hukum oleh patroli kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian Resort Labuhan Batu
- Bidang** : Hukum
- Daerah Penelitian** : Kabupaten Labuhan Batu
- Lama Penelitian** : 10 Juni s/d 10 September 2009
- Pengikut/Peserta** : Sendiri
- Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Mitra Kerja** : -
- Maksud dan tujuan** : Untuk bahan pembuatan skripsi, guna menyelesaikan studinya di tingkat akhir .

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kantor/Kaban Kesbang dan Linmas setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kegiatannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Gubernur Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
6. Surat pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : M e d a n
Pada tanggal : Juli 2009.



Tembusan :

1. Bapak Mendagri Up. Dirjen Kesbang Po
2. Gubsu sebagai laporan.
3. Bupati Labuhan Batu Up. Bakesbang
4. Dekan Fakultas Hukum Univ. Andalas Padang
5. P e r t i n g g a l.-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 e-mail: fh_ua@yahoo.com

Nomor : 882 /H.16.4/PP-2009

8 Juni 2009

Lamp. :
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabin. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: ENDRIANSYAH DALIMUNTHER
Nomor BP	: 05140001
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan Pidana
Alamat	: Jln. Simpang Lintang Pasar Baru
Pembimbing	: Dr. Ismansyah, SH.,MH H. A Irzal Rias, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (10 Juni s/d 10 September 2009)
Tempat Penelitian	: Sumatera Utara
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Penegakan Hukum Oleh Patroli Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian Wilayah Hukum Kepolisian Resrt Labuhan Batu

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih



- Jembukan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing
 4. Ketua Bagian Hukum Pidana
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Peringgal



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PATROLI

1. Waktu : Hari. Rabu Tgl. 18 Maret 2009 Pkl. 17.00 Wib
2. Petugas : 1. APTU R. E. SAGALA / Nrp 66030171.
2. AIPDA H. J. SITINJAK / Nrp 68100362
3. Dasar Penugasan : Surat Perintah No. Pol : Sprint / / III / 2009 / LL, / Tgl. 16 Maret 2009.
4. Tugas yang dilaksanakan
rule / Sasaran patroli : Jln. Sudirman Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang Kab Lab Batu Selatan.
5. Uraian kejadian yang ditemui : - Spm Yamaha Jupiter MX BK 5605 PK, Melanggar kewajiban memakai Helm pengaman.
- Mopen Kijang Extra BK 1949 EI, Melanggar kewajiban Penggunaan sabuk pengaman.
- Mobar Colt Diesel Mitshubishi BK 8215 PB, Melanggar kewajiban Penggunaan sabuk pengaman.
6. Tindakan yang diambil : - Memberikan arahan kepada Pengemudi agar setiap mengendarai kendaraan agar melengkapi SIM, dan sebelum berangkat mengemudikan rannya agar memeriksa perlengkapan surat yang dibutuhkan sehingga tidak ada yang tertinggal.
- Memberikan arahan kepada Pengemudi agar setiap mengendarai kendaraan agar memakai sabuk pengaman saat mengemudi.
- Melakukan penindakan terhadap pengemudi berupa :
- Teguran : Psl 61 (2) UULAJ Yo 70 PP 43
- : Psl 61 (2), (3) UULAJ Yo 70 44
- : Psl 61 (2), (3) UULAJ Yo 70 44
- Tilang : -
7. Saran – saran dari anggota yang melaksanakan patroli kepada kesatuan / pimpinan setelah melaksanakan patroli. :

Diketahui Oleh :
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU
KASAT LANTAS

TRIS LESMANA ZEVIANSYAH, SH, SIK
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79111130

Kota Pinang, 18 Maret 2009
PELAPOR:
KAGATUR LANTAS POLSEKTA KOTA PINANG

R. E. SAGALA
AIPDU NRP 66030171



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H. Idris Hsb No. 4 Telp. (0624) 22600, 325688 Fax. (0624) 22600
UJUNG BANDAR - RANTAUPRAPAT - KP. 21415
e-mail : bappeda@labuhanbatu.com

Rantauprapat, 23 Juli 2009

Homou
Sifat
Lampiran
Perihal

070/249/BPPD/11/2009
Biasa

Kepada,
Yth. Polres Labuhanbatu

: **Rekomendasi Izin Penelitian**

di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Sumatera Utara Nomor 070-2476/BKB.PM, dan Surat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Nomor 070/579/BKBPPM/2009 tanggal 22 Juli 2009 perihal tersebut diatas, dengan ini diharapkan bantuannya agar dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : ENDRIANSYAH DALIMUNTHE |
| 2. Alamat di Padang di Labuhanbatu | : Jl. Andalas I No. 48 F Padang
: Jl. Nenas Rantauprapat |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 4. NIM/NIP | : 05140001 |
| 5. Judul Penelitian | : "PENEGAKAN HUKUM OLEH PATROLI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT LABUHANBATU" |
| 6. Tempat Penelitian | : Polres Labuhanbatu |
| 7. Lamanya | : 3 (tiga) Bln |
| 8. Peserta/Pengikut | : Sendiri |
| 9. Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang |

Dengan ketentuan kepada yang bersangkutan mematuhi :

- Mematuhi segala peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku
- Menghindari diri dari perkataan, pernyataan dalam tulisan maupun lisan yang dapat menimbulkan SARA, menghina/menyinggung perasaan atau mendiskreditkan Bangsa, Negara, Agama dan Pemerintah RI
- Dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum, selama mengadakan penelitian ditempat tujuan
- Melaporkan hasil dari kegiatan/penelitian tersebut kepada Bupati Labuhanbatu c/q. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu selambat-lambatnya 14 hari setelah selesai penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan menjadi urusan selanjutnya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Kepala BAPPEDA KABUPATEN LABUHANBATU
Sekretaris



HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI S.Sos

PEMBINA

LABUHANBATU 19641121 199103 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Bupati Labuhanbatu (sebagai laporan)
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya ✓

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU

HASIL OPS PEKAT III TOBA-2009
TGL15 NOPEMBER S/D 14 DESEMBER 2009
POLRES LABUHANBATU


NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			AS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Hari Sabtu Tgl 14 Nop 2009, Pukul 13.00 Wib, di Dsn Sibuya Kel Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu	Polres Labuhanbatu		1	MULIA HARAHAHAP, Lk, 27 Thn, Islam, Tukang Becak, Jln. Dewi Sartika Gg. Sahabat, Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu	1	NKRI	- Uang Tunai - Notes - Boil Point - Kertas Karbon	- Rp. 394.000 - 1 Buah - 1 Buah - 1 Buah	Proses Sidik
2	Senin, 16 November 2009 Pkl. 10.00 Wib, Di Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu	Polsek Bilah Hilir	Miras	1	ELIGUS SINAGA Als HITADO, Lk, 50 Th, Kristen, Wiraswata, Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu	1	I	Minuman Keras Merk ASOKA	48 Botol	Proses Sidik

12										
NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Selasa 17 Nop 2009 Pkl. 23.00 Wib, Di Suah Warung Dsn. Kapung Selamat Ds. Kapung Padang Kec. Pagkatan. Kab. Labuhanbatu	Polsek Bilah Hilir	JUD	1	1. SAHAT NAINGGOLAN, Lk, 57 Thn, Kristen, Tani, Dsn Kapung Selamat Ds. Kapung Padang Kec. Pagkatan. Kab. Labuhanbatu 2. ALBERT LUMBAN TOBING, Lk, 27 Thn, Kristen, Mocok - mocok, Dsn Kapung Selamat Ds. Kapung Padang Kec. Pagkatan. Kab. 3. SARBARITA PANJAITAN, Lk, 49 Thn, Kristen, Tani, Dsn Kapung Selamat Ds. Kapung Padang Kec. Pagkatan 4. FRANCISCO SIMATUPANG, Lk, 28 Thn, Keisten, Tani, Dsn Kapung Selamat Ds. Kapung Padang Kec. Pagkatan. Kab. Labuhanbatu	4	N K R I	- Kartu Domino - Pena - Uang Kontan	- Set - 1 Buah - Rp 110.000	Proses Sidik
4	Hari Rabu Tanggal 18 Nop 2009 Pkl. 00.30 Wib Di Dsn Bulu Soma Ds Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu	Polsek Aek Natas	JUD	1	1. MUDI K SITUMORANG, Lk, 36 Thn, Wiraswata, Dsn Bulu Soma Ds Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu 2. HAMDANI MUNTHE, Lk, 27 Thn, Bertani, Dsn Bangun selamat Ds. Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab.	2	N K R I	-Kartu Domino -Uang Kontan	- 1 Set - Rp 64.000	Proses Sidik
5	Hari Rabu tgl 18 Nop 2009 Pkl. 14.00 Wib Desa Pangkalan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu	Polsek Aek Natas	JUD	1	1. SADIKUN, Lk, 53 Thn, Buruh, Desa Pangkalan Kec. Aek Natas 2. BOBI SIMBOLON, Lk, 27 Thn, Buruh, Kristen, Desa Pangkalan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu 3. ADI, Lk, 28 Thn, Buruh, Islam, Desa Pangkalan Kec. Aek Natas 4. SARIFUDDIN, Lk, 23 Thn, Islam, Buruh, Desa Pangkalan Kec. Aek Natas 5. AGUS BUDIMAN, Lk, 25 Thn, Buruh, Islam, Desa Pangkalan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu	5	N K R I	-Kartu domino - Uang	- 1 Set -Rp. 21.000	Proses Sidik

RAHASIA


NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Hari Kamis Tgl 19 Nop 2009, Pkl 22.48 Wib. Di Dsn V Ds. Blungit Kec. Marbau	Polsek Marbau	Miras	1	1. P. SILITONGA, Lk, 45 Thn, Wiraswasta, Kristen, Stasiun K Api Padang Halaban Dsn V Ds. Blungit Kec. Marbau	1	N K R I	Miras dari berbagi merek	- 50 Botol	Proses Sidik
7	Hari Kamis tgl 19 Nop 2009 Pkl. 15.00 Wib di Dsn Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan	Polsek Torgamba	Narkoba (Daun Ganja Kering)	1	1. ABI Als AMIN, Lk, 33 Thn, Wiraswasta, Budha, Dsn Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan	1	N K R I	- Daun Ganja Kering	- 1 bungkus kecil	Proses Sidik
8	Hari Jum'at tgl 20 Nop 2009 Pkl. 15.00 Wib di Kel Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu	Polsek Bilah hilir	Narkoba (Daun Ganja Kering)	2	1. MUHAMAD RIZAL HARAHAAP, Lk, 19 Thn, Ikut Orang Tua, Islam, Pajak Baru Gg. Sepakat Kel. Negeri Lama Kec. Bila Hilir 2. HURSIN ALATAS RTNG Als USIN, Lk, 18 Thn, Ikut Orang Tua, Islam, Lingk Titi Panjang Kel. Negeri Lama Kec. Bila Hilir 3. RIZAL AMIN, Lk, 17 Thn, Ikut Orang Tua, Islam, Jln. Karya Kel. Negeri Lama Kec. Bila Hilir	5	N K R I	- Daun Ganja Kering - Kertas Tiktak - Rokok - Uang Tunai	- 5 bungkus kecil - 3 Lembar - 2 Batang - Rp.500.000	Proses Sidik
9	Hari Jum'at tgl 20 Nop 2009 Pkl. 15.00 Wib di Perumahan Emplasmen PT. Socfindo Ds .Perkebunan Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir				1. SORI TUA POHAN Als UCOK, Lk, 18 Thn, Islam, Pelajar, Afd I PT. Socfindo Ds .Perkebunan Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir 2. JEFRI, Lk, 17 Thn, Islam, Ikut Orang Tua, Afd I PT. Socfindo Ds .Perkebunan Negeri Lama Seberang Kec. Bilah Hilir					


RAHASIA

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG SUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Kamis, Tgl 19 Nop 2009 Pkl 13.30 Wib, Dsn Mangga Dua Kec. Aek Natas	Polsek Aek Natas	Miras	1	JULLER TAMPUBOLON, Lk, 35 Thn, Wiraswasta, Dsn Mangga Dua Kec. Aek Natas	1	N K R I	- Miras	- 24 Botol	Proses Sidik
11	Sabtu Tgl 21 Nop 2009. Pkl 15.00 Wib, di Jln. A. Yani Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir	Polsek Panai Hilir	Miras	1	KARTINI Als CU HUE, Pr, 41 Thn, Budha, Pedagang, Jln. A. Yani No. 10 Kel. Sei Berombang Kec. Panai Hilir	1	N K R I	- Miras	72 Botol	Proses Sidik
12	Minggu Tgl 22 Nop 2009, Pkl 11.30 Wib, Di Loket Bilah Pane Jln. Adam Malik Kel. Padang Bulan, Kab. Labuhanbatu	Polres Labuhanbatu		1	RAHMAD JANDRI SIREGAR, Lk, 24 Thn, Islam, Agen Motor, Jln. Mesjid Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu	1	N K R I	- Uang Tunai - Hp Nokia - Buku Tapsir Mimpi - Bloc - Notes - Pena	- Rp.290.000 - 1 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 1 Buah	Proses Sidik
13	Jumat Tgl 20 Nop 2009, Pkl. 15.00 Wib, di Desa Pekan Tolan Kec. Kp. Rakyat Kab. Lab.,Batu	Polsek Kp. Rakyat	Miras	1	3. ANTON PURBA, Lk, 34 Thn, Pedagang, Desa Pekan Tolan Kec. Kp. Rakyat Kab. Labuhanabatu 4. SUMARWAN Als BANDOT, Lk, 44 Thn, Wiraswasta, Dsn Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kp.Rakyat. Kab Lab Batu	2	N K R I	- Miras	16 Botol	Proses Sidik
14	Kamis Tanggal 19 Nop 2009 pkl. 16.00 Wib Dsn Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kp. Rakyat Kab. Lab. Batu	Polsek Kp. Rakyat	Miras	1	TJI MUN, LK, 43 Thn, swasta, Dsn Bis II Desa Pekan Tolan Kec. Kp. Rakyat Kab. Lab,Batu	1	N K R I	- Miras	- 55 Btl	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		NAMA	JLH	KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH				JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Minggu Tgl 22 Nop 2009, Pkl 17.30 Wib, Di Tersa Rumah Dsn Labuhan Desa Tanjung Medan Kec. Kp. Rakyat Kab. Labuhanbatu	Polsek Kp. Rakyat	Miras	1	1. RAHMAD JAILANI ALS EBE, Lk, 31 Thn, Islam, Anggota SPSI, Dsn Air Gapuk Desa Tanjung Medan, Kec. Kp. Rakyat Kab. Labuhanbatu 2. BUDI ADENAN HRP Als BUDI, Lk, 29 Thn, Islam, Tukang Timbang, Dsn Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kec. Kp. Rakyat. 3. ARIFIN SRG Als RIFIN, Lk, 25 Thn, Islam, Anggota SPSI, Jln. Tandan Dsn. Kampung Jawa Desa Tanjung Medan Kec. Kp. Rakyat. Kab. Labusel	3	N K R I	- Kartu Domino - Blok Notes - Uang Tunai	- 28 Lbr - 1 Lbr - Rp. 195.000	Proses Sidik
16	Minggu, 22 Nop 2009 Pkl. 17.30 Wib Toko UD Nova Jln. Urip No 54 R. Prapat Kec. R. Utara	Polres Labuhanbatu	Miras	1	- PURNAMA Br GULTOM, Pr, 38 Thn, Kristen, Wiraswasta, Jln. Urip No 54 R. Prapat. Kec. Rantau Utara	1	N K R I	- Miras	54 Kotak (1104 Btl)	Proses Sidik
17	Sabtu, 21 Nop 2009 Pkl. 21.15 Wib Dsn X Desa Aek Hitetores Kec. Merbau	Polsek Merbau	Miras	1	- DIAN, Lk 28 Thn, Wiraswasta, Stasiun Kereta Api Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Lab. Batu,	1	N K R I	- Miras	- 48 Botol	Proses Sidik
18	Minggu, 22 Nop 2009 Pkl. 19.00 Wib Desa Kamp. Pajak Kec. Na IX- X Kab. Lab. Batu	Polsek NA IX - X	Miras	1	- RUMONDANG SIPAHUTAR, Lk, 30 Thn, Islam, Wiraswasta, Desa Kamp. Pajak Kec. Na IX- X Kab. Lab. Batu	1	N K R I	- Miras	- 30 Btl	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Kamis, Tgl 19 Nop 2009 Pkl. 01.00 Wib Dsn Sumber Sari Ds. Mandala Sena Kec. Silangkitang. Lab., Batu	Polsek Silangkitang	Judi	1	1. SARIPUDDIN Als KRITING, Lk, 44 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang 2. ARIADI, Lk, 38 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala sena Kec. silangkitang Kab. Lab. Batu 3. SUKMAYADI Als SUKMA, Lk, 23 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang. 4. AZHARI Als CACA, Lk, 36 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang 5. NGATIO Als NGAT, Lk, 36 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang 6. DEDI SYAHPUTRA Als DEDI, Lk, 36 Thn, Supir, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang 7. IJON KUSWANDRI Als IJON, Lk, 27 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang 8. HENDRI RAJA HASIROLAN SITOMPUL, Lk, 24 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang Kab. Lab. Batu 9. WAHANA Als WANA, Lk, 28 Thn, Tani, Islam, Dsn Aek Kulim Ds Mandala Sena Kec. Silangkitang	9	N K R I	- Mata dadu Kopyok	- 3 Buah	Proses Sidik
								- Ember Kecil	- 1 Buah	
								- Perlak beberan dadu	- 1 Buah	
								- Piring Kaca warna putih	- 1 Buah	
								- Uang tunai	- Rp 230.000	



NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Minggu, 22 Nop 2009 Pkl. 10.00 Wib Kamp Banjar I Kota Pinang Kel K. Pinang Kab. Lab. Batu	Polsek Kota Pinang	Narkoba	1	1. SOPYAN HRP Als PIAN, Lk, 25 Thn, Islam, SPSI, Kamp Banjar I K. Pinang Kec. K. Pinang 2. ROHYAL NST, Lk, 26 Thn, Islam, Bangunan, Kamp Banjar I K. Pinang Kec. K. Pinang Kab. Lab. Batu 3. AHMAD ADHA Als ADEK, Lk, Islam, 20 Thn, Tukang mUat, Kamp Banjar I K. Pinang Kec. K. Pinang 4. JULKIFLI Als IJUL, 20 Thn, Islam, IOT, Kamp Banjar I K. Pinang Kec. K. Pinang Kab. Lab. Batu 5. JIMMY ULUL AJMI NST Als JIMMY, 17 Thn, Isla, Kamp Banjar I K. Pinang Kec. K. Pinang Kab. Lab. Batu	5	N K R I	- Rokok Surya - Daun Ganja	- 1 Bungkus - 1 Bungkus Plastik	Proses Sidik
21	Senin, Tgl 24 Nop 2009 Pkl. 16.30 Wib DI Lingk.Kamp. Awah Kec. Rantau Selatan Kab.. Lab.,Batu	Polsek Bilah Hulu		1	1. MARULI PANJAITAN,Lk, 51 Thn, Wiraswasta, Kristen,Gg. Mancis Lingk. Tengah Kel. Perdamalan. Kec. R. Utara Kab. Lab. Batu 2. EFENDI PANJAITAN Lk, 59 Thn, Tani, Kristen, Lingk. Kampung swah kel. SigambalKel. R. utara Kab.Lab.Batu 3. JERGENSEN TOGATOROP, Lk, 50 Thn, Kristen, Wiraswasta, Lingk. Kampung swah kel. SigambalKel. R. utara Kab.Lab.Batu	3	N K R I	- Uang Tunai - Kartu Joker -Karpel/ Lapak	- Rp 107.000 - 2 Set - 1 Lbr	Proses Sidik



NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Sabtu, 21 Nop 2009 Pkl. 20.00 Wib. Dsn Plung Lombang Desa Sei raja Kec. NA IX - X Kab. Lab. Batu.	Polsek NA IX - X	Pros Ilusi	1	1. ANTO SIAGIAN, Lk, 36 Thn, Islam, Wiraswasta, Dsn Rumbya Desa Batu Tunggal. Kab. Lab. Batu 2. RISMA HASIBUAN, Lk, 26 Thn, Islam, Ibu Rumah Tangga, Desa Kamp. Pajak Kec. NA IX - X Kab. Lab. Batu	2	NKRI			Bina
23	Senin, 23 Nop 2009 Pkl. 15.00 Wib. Di Café Bambu Simp. Tanjung Pasir Kec. Kualuh Selatan Kab. Lab. Batu	Polres Labuhanbatu	Narkoba	1	1. WAN SAPRIL MAULANA Als APRIL Als om, 35 Thn, Wiraswasta, Jln. Aek Matio Gg. Hasibuan Kel. Siringo - ringo Kec. Rantau Utara. Kab. Lab. Batu 2. EDI SYAHPUTRA TANJUNG Als ADI, 28 Thn, Supir, Jln. Sadikun Lestari simp. Magga Kel. Bakaran Batu Kec. R. Selatan Kab. Lab. Batu	2	NKRI	- Daun Ganja Besar - Daun Ganja Kecil	- 17 Bungkus - 12 Bungkus	Proses Sidik
24	Selasa, tanggal 24 Nop 2009 Pkl. 15.00 Wib. Di Simp. Mulla Cikampak Desa Aek Batu Kec. Torgamba Keb. Lab. Batu Kab. Lab. Batu	Polsek Torgamba		1	1. JOKO, Lk, Islam, Wiraswasta, Simp Halaman Dsn Pinang Awan Desa Aek batu Kec. Torgamba Kab. Lab. Batu 2. PUTRA DINATA, Lk, 23 Thn, Wiraswasta, Lingk. Kamp. Jawa Cikampak, Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Lab. Batu	2	NKRI	- Kartu Domino - Uang Tunai	- 2 Set - Rp. 25.000	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Selasa, Tgl 24 Nop 2009 Pkl. 05.30 Wib Di Jalan A. Yani Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab.Lab.Batu	Polres Labuhanbatu	Narkoba	1	YUSERWADI, Als WALUH, Lk, 33 Thn, Tukang Bangunan, Pasar VI Andan Sari Kel. Terjun Medan Marelan.	1	N K R I	Shabu - shabu	- 2 bks kecil (\pm 5 gr)	Proses Sidik
26	Rabu Tgl 25 Nop 2009, Pkl 11.30 Wib, di Kafe- kafe Pinggiran Rel Kereta Api Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau.	Polsek Marbau	Miras	7	1. IAN, Lk, 24 Thn, Wiraswasta, Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau.	7	N K R I	- Miras	- 101 Botol	Proses Sidik
27					2. CICI, Pr, 34 Thn, Wiraswasta, Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau					
28					3. YUDI EFENDI, Lk, 21 Thn, Wiraswasta, Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau					
29					4. TAPIL TAMBUNAN, Lk, 40 Thn, Wiraswasta, Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau					
30					5. KAMSIAR, Lk, 40 Thn, Wiraswasta, Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau					
31					6. EDI SUPRIANTO, Lk, 37 Thn, Wiraswasta, Desa Perkebunan Brussel Kec. Marbau					
32					7. RIKO SIMARMATA, Lk, 18 Thn, Buruh, Desa Sidomulyo, Kec. Aek Kuo Kab. Labura					

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Selasa, 24 Nop 2009 Pkl. 11.00 Wib. Di Jln. Ampera Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Lab. Batu	Polsek Bilah Hulu	Miras	2	1. POLTAK PANJAITAN, Lk, 40 Thn, Wiraswasta, Jln. Ampera Aek Nabara Kec. B. Hulu Kab. Lab. Batu	5	NKRI	- Miras	- 288 Boto	Proses Sidik
34					2. J. SIHALOHO, Lk, Lk, 57 Thn, Wiraswasta, Jln. Ampera Aek Nabara Kec. B. Hulu Kab. Lab. Batu 3. LINA, Pr, 35 Thn, Wiraswasta, Jln. Lintas Ds. Perbaungan Aek Nabara Kec. B. Hulu Kab. Lab. Batu 4. JAMILAH, Pr, 32 Thn, Wiraswasta, Jln. Lintas Ds. Perbaungan Aek Nabara Kec. B. Hulu Kab. Lab. Batu 5. T. TAMBUNAN, Lk, 39 Thn, Wiraswasta, Jln. Lintas Ds. Perbaungan Aek Nabara Kec. B. Hulu Kab. Lab. Batu					
35	Selasa, 24 Nop 2009 Pkl. 12.00 Wib. Di Dsn Suka Makmur Desa Sabungan Kec. Sei Kanan Kab. Labusel	Polsek Sei Kanan	Miras	4	1. ARPANA ARITONANG, Lk, 51 Thn, Wiraswasta, Di Dsn Suka Makmur Desa Sabungan Kec. Sei Kanan	4	NKRI	- Miras	- 276 Botol	Proses Sidik
36					2. ALENG SIREGAR, Lk, 32 Thn, Wiraswasta, Di Dsn Suka Makmur Desa Sabungan Kec. Sei Kanan					
37					3. MINA, Pr, 32 Thn, Wiraswasta, Di Dsn Suka Makmur Desa Sabungan Kec. Sei Kanan					
38					4. WIRAWAN, Lk, 35 Thn, Wiraswasta, Di Dsn Suka Makmur Desa Sabungan Kec. Sei Kanan					

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Rabu, Tgl 25 Nop 2009 Pkl. 22.00 Wib Di Kafe Pinggiran Rel Kereta Apl Ling. I Kel. Merbau Kec. Merbau Kab. Labura.	Polsek Merbau	Miras	1	DARMAWATI Br PASARIBU, Pr, 50 Thn, IRT., Ling. I Kel. Merbau Kec. Merbau Kab. Labura.	1	N K R I	Wisky Putri Sulung	- 12 Btl	Proses Sidik
40	Rabu Tgl 25 Nop 2009, Pkl 22.30 Wib, di Kafe- Dusun III Kamp. Jawa Desa Merbau selatan Kec. Merbau Kab. Labura	Polsek Merbau	Miras	1	8. LINA, Pr, 31 Thn, Wiraswasta, Dusun III Kamp. Jawa Desa Merbau selatan Kec. Merbau Kab. Labura	1	N K R I	- Sea Horse - Wisky Putri Sulung	- 1 Botol - 6 Botol Kecil	Proses Sidik
41	Kamis, Tgl 26 Nop 2009 Pkl. 17.00 Wib, Di Dusun Pulung Rejo Desa Mandala Sena Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu	Polsek Silang kitang	Miras	1	1. WITO, 38 Thn, Wiraswasta, Dusun Pulung Rejo Desa Mandala Sena Kec. Silangkitang Kab. Labuhanbatu	1	N K R I	- Black Hos Asoka	- 84 Botol	Proses Sidik
42	Sabtu, Tgl 28 Nop 2009 pkl. 16.00 Wib Di Simp Suzuki Labuhan baru Kota Pinang Kab. Labusel	Polsek Kota Pinang	Narkoba	1	1 IBNU FAISAL Als IBNU, Lk, 17 Thn, Islam, Pelajar Gg Pancasila Lingk Kaqla Pane Kota Pinang. Kab. Labusel	1	N K R I	- daun Ganja Kering - Kertas Peper / Tiktat warna putih	- 3 Amp - 5 Lembar	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Rabu Tgl 25 Nop 2009, Pkl 20.15 Wib, di Dsn VI Sei Kanan Desa Perk Teluk Panji Kec. Kp. Rakyat Kab. Labusel	Polsek Kp. Rakyat	Narkoba	1	1 JUNEDI MANIK Als IJUN, Lk, 27 Thn, Islam, Anggota SPSI, Dsn Siderejo Desa S 6 Kec. Bilah Hulu Kab. Lab. Batu	1	NKRI	- Daun Ganja Kering - Uang Kertas - Sp Motor Honda Revo BK 5323 ZV	- 2,5 Ons - 1 Lembar - 1 Unit	Proses Sidik
44	Sabtu, 28 Nop 2009 Pkl. 14.00 Wib Lingk II Wono sari Kel. Aek kanopan. Kab. Labura	Polsek Aek Kanopan		1	1. EKO HENDRO GUNAWAN, Lk, 26Thn, Budha, Wiraswasta, Lingk II Wono sari Kel. Aek kanopan. Kab. Labura 2. SOFIAN, Lk, 24 Thn, Islam, Wiraswasta, Lingk II Wono sari Kel. Aek kanopan. Kab. Labura	2	NKRI	- Hp Nokia - Kertas Tebakan - Uang Kertas	- 1 Unit - 2 Lbr - Rp. 70 .000	Proses Sidik
45	Sabtu, 21 Nop 2009 Pkl. 15.30 Wib Dsn Tapian Nauli Desa Sukarame Baru Kab. Labura	Polsek Kualuh Hulu		1	1 BUDIMAN SIMBOLON, Lk, 54 Thn, Tani, Dsn Tapian Nauli Desa Sukarame Baru. Kab. Labura 2 RAMLAN NAINGGOLAN, Lk, 43 Thn, Tani, Dsn Tapian Nauli Desa Sukarame Baru Kab. Labura 3 SAHALA TAMPUBOLON, Lk, 41 Thn, Tani, Dsn Tapian Nauli Desa Sukarame Baru; Kab. Labura 4 EDISON HUTABARAT, Lk, 59 Thn, Tani, Wonosari Lingk III Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu	4	NKRI	- Kartu Joker - Uang Tunai	- 1 Set - Rp.23.000	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Sabtu, 20 Nop 2009, Pkl. 23.00 Wib di Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba	Polsek Torgamba		1	1. HERI KISWANTO, Lk, 31 Thn, Tanl, Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba 2. PRISTIWANTO, Lk, 30 Thn, Buruh, Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba 3. RIMBING, Lk, 19 Thn, Buruh, Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labusel 4. SELAMET, Lk, 19 Thn, Buruh, Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba 5. SYARBANI SIREGAR, Lk, 15 Thn, IOT, Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba	5	N K R I	- Kartu Domino - Uang Tunai	- 1 Set - Rp. 115.000	Proses Sidik
47	Sabtu, 28 Nop 2009, Pkl. 23.30 Wib di Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba	Polsek Torgamba		1	1. MUHAMMAD NST, Lk, 32 Thn, Supir, Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labusel 2. DERMAWAN, Lk, 29 Thn, Buruh, KM 6 Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labusel 3. DEDEK SIREGAR, Lk, 24 Thn, Buruh, KM 6 Dsn Aek Torop Ds. Asam Jawa Kec. Torgamba	3	N K R I	- Kartu Joker - Uang tunai	- 1 Set - Rp. 38.000	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Kamis, 26 Nop 2009. Pkl. 16.00 Wib, di Areal Kebun PT. SPS Dsn Sukajadi Ds. Sabungan Kec. Sei Kanan.	Polsek Sei Kanan	Ugah	1	1. ZULHAMDAN T. Lk, 42 Thn, Karyawan, Perumahan PT. SPS Dsn Sukajadi Ds. Sabungan Kec. Sei Kanan. 2. SUDARMAN MANIK, Lk, 42 Thn, Karyawan, Perumahan PT. SPS Dsn Sukajadi Ds. Sabungan Kec. Sei Kanan. 3. SUHENDI, Lk, 32 Thn, Karyawan, Perumahan PT. SPS Dsn Sukajadi Ds. Sabungan Kec. Sei Kanan. 4. TADING SIREGAR, Lk, 46 Thn, Karyawan, Perumahan PT. SPS Dsn Sukajadi Ds. Sabungan Kec. Sei Kanan. Kab. Labusel	4	NKRI	- Kartu Domino - Uang Tunai - Tikar	- 2 Set -Rp. 124.000 - 1 Buah	Proses Sidik
49	Minggu, Tgl 29 Nop 2009 Pkl. 22.00 Wib Di Dsn Pinang Lombang Desa Sei Raja Kec. NA IX - X Kab. Labura	Polsek NA IX - X	Miras	1	1 HERMAN PASARIBU, Lk, 30 Thn, Islam, Wiraswasta, Dsn Pinang Lombang Atas Desa Sei Raja Kec. NA IX - X Kab. Labura	1	NKRI	- Miras	- 12 Botol	Proses Sidik
50	Sabtu, Tanggal 28 Nop 2009 Pkl. 21.00 Wib. Di Dsn Kualuh Desa Aek Hitetoras Kec. Merbau Kab. Labura	Polsek Merbau	Miras	2	1 RONY NAINGGOLAN, Lk, 25 Thn, Wiraswasta, Desa Simulyo Kec. Aek Kuo Kab. Labura 2 SUMI, Pr, 30 Thn, Wiraswasta, Dusun Kualuh Desa Aek Hiteiores Kec. Merbau Kab. Labura	2	NKRI	- Miras	- 24 Botol	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Senin, Tanggal 30 Nop 2009 Pkl. 21.30 Wib, Dsn I Desa Belungkut Kec. Merbau Kab. Labura	Polsek Merbau	Miras	1	1. ITA HUTABARAT, Pr, 48 Thn, Desa Tanjung harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu	1	N K R I	- Miras	- 8 Botol	Proses Sidik
52	Rabu Tanggal 25 Nop 2009 Pkl. 20.00 Wib Ds Perk Teluk Panji Kec. Kp. Rakyat Kab. Labusel	Polsek Kp Rakyat	Narkoba	1	1. SYAHRIAL RITONGA, Lk, 26 Thn, Mocok - mocok, Islam, Dsn I Sidodadi Ds Perk Teluk Panji Kec. Kp. Rakyat Kab. Labura	1	N K R I	- Daun Ganja Kering	- 1 Bungkus (0.5 Gram)	Proses Sidik
53	Jumat, 27 Nop 2009 Pkl. 00.30 Wib, Di Lingk Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu	Polsek Biluh Hulu	Narkoba	1	1. ROMINTON Als MINTON.Lk, 24 Thn, Ikut orang Tua, Kristen, Lingk Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. R. Utara Kab. Labuhanbatu 2. HERMAN TAMBUNAN Als HERMAN, Lk, 24 Thn, Ikut Orang Tua, Kristen, Lingk Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. R. Utara Kab. Labuhanbatu 3. RANTO GULTOM, Lk, 27 Thn, Ikut Orang Tua, Kristen, Lingk Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. R. Selatan Kab. Labuhanbatu	3	N K R I	- Puntung rokok Club Mild - Bercampur Daun Ganja	- 1 Batang - 1 gram	Proses Sidik
54	Rabu 25 Nop 2009, Pkl. 20.00 Wib, Ds. Perkebunan Teluk Panji Kec. Kp. Rakyat Kab. Labusel	Polres Labuhanbatu	Narkoba	1	1. SIIN Als KOIN, Lk, 26 Thn, Mocok-mocok, Dsn Sidodadi Ds. Perkebunan Teluk Panji Kec. Kp. Rakyat Kab. Labusel	1	N K R I	- Ganja Kering - Uang Rp	- 1 Bks Kecil (± 5 Gram) - Rp. 20.000	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Selasa, 01 Des 2009 Pkl. 16.00 Wib Di Dsn Sumberjo Desa Sri Raja Kec. NA IX - X Kab. Labura.	Polsek NA IX - X	Ugda	2	1 EDY SUYANTO SRG Als TOGEL, Lk, 41 Thn, Islam, Karyawan, Dsn III Ds Berangir Kec. NA IX - X Kab.Labura 2 NASIP, Lk, 55 Thn, Idlam, Wiraswasta, Dsn Sumberjo Ds Sei Raja Kec. NA IX - X Kab. Labura 3 RASIMAN, Lk, 51 Thn, Islam, Tani, Dsn Tambak Lobang Desa Pasang Lela Kec. NA IX -X Kab. Labura 4 ANUR SRG Als ANDAR,Lk, 37 Thn, Islam, Supir, Dsn Tambak Lobang Desa Pasang Lela Kec. NA IX -X Kab. Labura 5 RAMLI, Lk, 32 Thn,Islam, Supir, Dsn Sumberjo Ds Sei Raja Kec. NA IX - X Kab. Labura 6 TOHIP (DPO), Lk, 50 Thn, Islam, Supir, Dsn Sumberjo Ds Sei Raja Kec. NA IX - X Kab. Labura	6	N K R I	Kartu Joker - Uang - Buku Tulis 18 Lbr	- 2 Set - Rp. 173.000 - 2 Buah	Proses Sidik
56	Rabu, tanggal 02 Desember 2009 pkl. 13.00 Wib, Di Kompleks PKS Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu	Polron Labuhanbatu	Narkoba	1	SYAHDAN BULELE Als ADAN, Lk, 18 thn, Ikut Orang Tua,Islam, Jln. Ampera aek nabara Kec. Bilah Hulu kab. Labuhanbatu.	1	N K R I	- Daun ganja - Uang	- 1 Bungkus - Rp. 40.000	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Rabu, Tanggal 01 Desember 2009 Pkl. 19.30 wib Di Simpang panigoran Kel. Aek Kota Batu	Polsek NA IX - X		1	1. ZULKARNAEN SRG Als BUYUNG, Lk, 53 Thn, Islam, Supir, Jln. Beringin No 28 Rantau Prapat 2. RIDHO SARAGI Als SORNOP, Lk, 30 Thn, Kristen, Supir, Kel. Aek kota Batu 3. KURNAN MATONDANG, Lk, 38 Thn, Islam, Supir, Desa Panjang Bidang Kel. Kualuh Selatan 4. GERANDONG (DPO), Lk, 38 thn, Islam, supir, Desa Bandar Durian Kec. Aek Natas	4	N K R I	- Mobil Kartex Bk 1833 YH - Uang Kertas	- 1 Unit - Rp. 65.000	Proses Sidik
58	Rabu, Tanggal 02 Desember 2009 Pkl. 15.00 Wib, Di Afd V Perk PTPN III Merbau Selatan Kec. Merbau Kab. Labura	Polsek Merbau		1	1. RIRI HARIANTO Als RIRI, Lk, 31 Thn, Wiraswasta, Dsn Tebangan Desa Kampung Baru Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.	1	N K R I	- Buku Reka Nomor - Buku blok - Karbon - Buku Tulis - Pulpen - Uang	- 1 Buah - 2 Buah - 1 Lbr - 1 Buah - 1 Buah - Rp 262.000	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Kamis, Tanggal 03 Des 2009 Pkl. 16.00 Wib, DI Lingk Ujung Godang Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX – X Kab. Labura	Polsek NA IX - X	100	1	1 SUKUR MUNTHE, Lk, 52 Thn, Islam, Petani, Kel. Aek Kota Batu Kec. NA IX – X Kab. Labura 2 YUSUF SIPAHUTAR, Lk, 36 Thn, Islam, Wiraswasta, Kel. Aek Kota Batu Lingk Ujung Godang Kec. NA IX – X Kab. Labura 3 MAMAT (DPO), Lk, 36 Thn, Islam, Wiraswasta, Lingk I Kel Aek Kota Batu Kec. Na IX – X Kab.Labura 4 PUDDIN (DPO) , Lk, 42 Thn, Islam, Wiraswasta, Lingk I Kel. Aek Kota Batu Kec. NA X – X Kab. Labura	4	N K R I	- Katu Joker - Uang Kertas	- 108 Lbr - Rp. 21.000	Proses Sidik
60	Rabu, Tanggal 03 Des 2009 Pkl. 14.00 wib DI Dsn Pardomuan Desa Tanjung Medan Kec. Kp. Rakyat Kab. Labusel	Polsek Kp. Rakyat	Miras	1	5. A. SIMANGUNSONG, Lk, 42 Thn, wiraswasta, Dsn Pardomuan Desa Tanjung Medan Kec. Kp. Rakyat kab. Labusel	1	N K R I	-Asoka Whisky Botol Kecil	- 48 botol	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Senin, Tanggal 07 Des 2009 pkl.21.33 Wib Dsn II Desa Belongkut Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu.	Polsek Merbau	Miras	1	1 IYEM, Pr, 35 Thn, Wiraswasta, Alamat Dsn II Desa Belongkut Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu	1	N K R I	- Sea Horse	- 6 Botol	Proses Sidik
62	Senin, tanggal 07 Desember 2009 Pkl. 16.00 Wib, Jln Dsn Siranggong Ds Damuli Pekan Kec. Kualuh Hulu.	Polsek Kualuh Hulu	1	1	1. KHAIRUDDIN SIHOMBING, Lk, 52 Thn, Islam, Nelayan, Dsn I Desa Simangalam Kec. Kualuh Selatan 2. TIMBUL ARITONANG, Lk, 39 thn, Kristen, Tani, Dsn Rianlate Ds Simangalam Kec. Kualuh Selatan 3. LELANG ARUAN, Lk, 25 Thn, Islam, Nelayan, Dsn Siderejo Ds Simangalam Kec. Kualuh selatan	3	N K R I	- Uang - Hp Nokia - Buku Tebakan - Blok Notes - buku Rekap angka - Spd Motor	Rp. 730.000 - 3 Unut - 1 Lbr - 8 Blok - 1 Lbr - Honda Supra Fit BK 2063 YT	Proses Sidik
63 64 65 66	Senin, Tanggal 07 Desember 2009 Pkl. 22.00 Wib, Dsn IX Kamp selamat Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo	Polsek Aek Natas	Miras	4	1. API, Lk, 49 Thn, Petani, dsn Grojokan Desa Pulau Jantan Kec. NA IX - X Kab. Labura 2. AMAT, Lk, 25 Thn, Wiraswasta, Desa Pulau Jantan Kec. NA IX - X Kab. Labura 3. PR HALOHO, Lk, 35 Thn, Pedagang, Dsn Grojokan Desa Pulau Jantan Kec. Na IX - X Kab. Labura 4. MAK NANDO, Pr, 33 Thn, Dagang, Desa Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labura	4	N K R I	- Miras	- 29 botol	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA	JLH		JENIS	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Selasa, Tanggal 08 Desember 2009 Pkl. 20.30 Wib, Dsn III Desa Bulunghit Kec. Merbau Kab. Labura	Polsek Merbau	Miras	1	1. SANIYEM, Pr, 38 thn, Ibu Rumah Tangga, Dsn III Desa Bulunghit Kec. Merbau Kab. Labura	1	N K R I	- Miras	- 24 Botol	Proses Sidik
68	Senin, Tanggal 09 Desember 2009 Pkl. 01.00 Wib, Di Jln H Adam Malik By Pass Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu	Polres Labuhanbatu	Illegal Logging	1	1. M NUR NASUTION Als PAK UONG, Lk, 44 Thn, Wiraswasta, Islam, Lingk Aek Matio Kel. Sirandorung Kec. R. Utara Kab. Labuhanbatu 2. AYUB, Lk, 41 Thn, Supir, Lingk Danau Bale Kel. Sigambal Kec. R. Selatan Kab. Labuhanbatu	2	N K R I	- Kayu Olahan Hutan - Mobil truk Cold Diesel	- 3 Ton - Wama Kuning BK 9086 LY	Proses Sidik
69	Hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2009 Pkl. 23.00 Wib, Di Dsn. Jatuhan Golok Ds. Simandulang Kec. Kualuh Leidong Kab. Labura LP/114/XII/2009/SPK Tgl. 10 Des 2009	Polsek Kualuh Hilir	Illegal Logging	1	3. KARIMIN Als MIN, Lk, 33 Thn, Islam, Tani, Dsn. Lorong Gori Ds. Simandulang Kec. K. Leidong 4. BASIRUN Als ARUN, Lk, 21 Thn, Islam, Tani, Ds. Bangun Baru Kec. Sei Payang Kab. Asahan. 5. SELAMAT Als MAMAT, Lk, 17 Thn, Islam, Tani Lorong Poncol Gori Ds. Simandulang Kec. K. Leidong	3	N K R I	- Stik / Kayu Sodok - Uang - Bola Bliyard	- 3 Buah - Rp. 20.000 - 16 Buah	Proses Sidik

NO	WAKTU	SATWIL	KASUS		PELAKU		KORBAN	BARANG BUKTI		KET
			JNS	JLH	NAMA			JLH	JENIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2009 Pkl. 16.00 Wib, di Desa Mampang Kec. Kota Pinang Kab. Labusel	Polsek Kota Pinang	Judi	1	1. JUMALIK Als KELIK, Lk, 35 Thn, Islam, SPSI, Dsn. Padang Pasir, Desa Mampang Kec. Kota Pinang 2. YUDI TAMBAK Als YUDI, Lk, 34 Thn, Islam, SPSI, Dsn. Padangri Ds. Simatahari Kec. Kota Pinang. 3. SABGO FREDY SITUMORANG, Lk, 24 Thn, Islam, Karyawan, Dsn. Padang Pasir, Desa Mampang	3	N K R I	- Kartu Domino - Uang Tunai	- 1 Set - Rp. 37.000	Proses Sidik
71	Sabtu Tgl. 12 Des 2009 Pkl. 23.00 Wib di Ds Suka Makmur Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu	Polres Labuhanbatu	Narkoba	2	1. NANDA HASIBUAN, Lk, 23 Thn, Ikut Orang Tua, Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu 2. AMAN TOJAD RITONGA, Lk, 41 Thn, Mocok-mocok, Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara 3. HORAS MARULI TUA DAULAY, Lk, 25 Thn, Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu	3	N K R I	- Daun Ganja - Uang Tunai	- 49 Bks Kecil - 4 Bks Sedang - Rp.5000	Proses Sidik
72										
73	Senin 14 Des 2009 Pkl. 07.30 Wib, Ds Kp. Pajak Kec. NA IX – X	Polsek Na IX – X	Narkoba	1	SAMSUL, Lk, 45 Thn, Buruh, Ds Kp. Nyaman Kec. Na IX – X Kab. Labura	1	N K R I	- Daun Ganja	- 20 Bks Kecil	Proses Sidik

Rantauprapat, 14 Desember 2009
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU


Drs. TOGA H. PANJAITAN
AKBP NRP. 67100294

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
Jln. MH. Thamrin No. 07 Rantauprapat

LEMBARAN DISPOSISI
NO. POL : TR / 274 / VIII / 2009 / Reskrim

Paraf / Tanggal 06 Agustus 2009

CATATAN

Meminimal tegas segala bentuk
perjudian

KASAT RESKRIM

Yth: URO

- pedoman.
- laksanakan pelaporan setiap
namnya ssi jadwal, agar
atensi x jgn terlambat.

06/08 09

KAUR BIN OPS

KANIT

4. MIN - Res

Buat Laporan setiap
waktu kirim ke Kapolda
DPR Reskrim paling
lambat pkl. 20.00 wib
fax. 061-7870355
jika pelaksanaan

06/08 09

Atensi

**TELEGRAM**

DARI:

KAPOLDA SUMUT

KEPADA:

1. KAPOLTABES MS

2. KAPOLRES / TA SEJAJARAN POLDA SUMUT

TEMPUHAN:

1. KAPOLDA SUMUT

2. IRWASDA POLDA SUMUT

3. KARO OPS POLDA SUMUT

4. DIR INTELKAM POLDA SUMUT

5. KABID PROPAM POLDA SUMUT

KLASIFIKASI

RAHASIA

TGL 5

08 2009

NO POL

TR / 341 / VIII / 2009

AAA TTK

REF TTK DUA

SATU TTK TR KAPOLRI NO.POL : TR / 553 / IX / 2007 TGL 17 SEPT 2007 ITG SEGALA BENTUK PERJUDIAN AGAR DITINDAK TEGAS DAN DIPROSES DAN DIPROSES TUNTAS SESUAI PERATURAN YG BERLAKU TTK

DUA TTK TR KABARESKRIM POLRI NO.POL : TR / 420 / DI / 17 VI / 2007 TGL 20 JUNI 2007 PERIHAL PERINTAH DAN ARAHAN AGAR SELURUH KAPOLDA MENINDAK SCR TEGAS SEGALA BENTUK PERJUDIAN SECARA KETENTUAN HUKUM BERLAKU TTK

TIGA TTK REN OPS POLDA SUMUT NO.POL : R / 04 / VII / 2009 TGL 25 JULI 2009 ITG REN OPS PEKAT II TOBA 2009 TTK

BBB TTK

SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA DIPERINTAHKAN KPD KA AGAR MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA

SATU TTK MENINDAK TEGAS THOP SEGALA BENTUK TP PERJUDIAN DIMALNYA MASING-MASING SCR INTENSIF DAN BER-ESINAMBUNGAN TANPA PANDANG BULU KMA JIKA POLRI YG TERLIBAT SPY L TERBAHKAH KPD PROPAM TTK PROSES SELANJUTNYA TTK

DUA TTK DLM MELAKUKAN TINDAKAN AGAR PROFESIONAL KMA PROPORSIONAL DAN PROSEDURAL SERTA LAKUKAN KOORDINASI DGN TOKOH-TOKOH MASY KMA TOKOH AGAMA ATAU INSTANSI TERKAIT UTK MENGHINDARI HAL HAL YG TDK DIINGINKAN TTK

/ TIGA

TELEGRAM KAPOLDA SUMUT
NO POL TR 1341 VII 2009
TANGGAL 2 08 2009

TIGA TTK HINDARKAN KESAN BHW POLRI KURANG BERSUNGUH-SUNGUH
DI M UPAYA BERANTAS TP PERJUDIAN TTK

EMPAT TTK AGAR MENJADI PERHATIAN SERIUS DAN ATENSI KMA JGR
MELAPORKAN HSL PENINDAKAN SETIAP HARINYA KPD KAPOLDA
SUMUT UP DIR RESKRIM POLDA SUMUT TTK

CCU TTK FORMAT LAPHAR HSL PENINDAKAN TP PERJUDIAN TSB SBB TTK DUA

SATU	TTK	KOLOM SATU NO TTK
DUA	TTK	KOLOM DUA HARI DAN TGL KEJADIAN TTK
TIGA	TTK	KOLOM TIGA NO DAN TGL LP TTK
EMPAT	TTK	KOLOM EMPAT TKP TTK
LIMA	TTK	KOLOM LIMA IDENTITAS DAN PERAN TSK TTK
ENAM	TTK	KOLOM ENAM BARANG BUKTI TTK
TUJUH	TTK	KOLOM TUJUH JENIS PERJUDIAN TTK
DELPA	TTK	KOLOM DELAPAN PETUGAS YG MELAKUKAN PENANGKAPAN TTK
SEMBIL	TTK	KOLOM SEMBILAN KET TTK

ODD TTK LAPHAR AGAR DIKIRIM KPD KAPOLDA SUMUT UP DIR RESKRIM SETIAP HARI
SELAMBAT-LAMBATNYA PKL 20.00 WIB KE NO FAX 061 - 7870355 TTK

EEE TTK TR INI BERSIFAT SBG PERINTAH UDL TTK

FFF TTK DUM TTK AN KAPOLDA SUMUT KMA DIR RESKRIM KRM TTK HBS

AN KAPOLDA SUMUT
DIR RESKRIM

Drs WAWAN IRAWAN
KOMDES POL NRP 63070700

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
Jln. MH. Thamrin No. 07 Rantauprapat

LEMBARAN DISPOSISI
NO. POL : ST2 - 1 302 / VIII / 2009 / Reskrim

Paraf / Tanggal 26 Agustus 2009

CATATAN	KASAT RESKRIM
pengiriman hasil penyelidikan terhadap kasus pengujian.	<p><u>M. Lito</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pedoman jawa direspon. - filekan. <p>26/08/09</p>
KAUR BIN OPS	KANIT
<p>41 AM - Res</p> <p>pedoman TR ini</p> <p>lempar plesang</p> <p>faul ke</p> <p>Res 26/08/09</p>	

POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DISTRITRIK SUMATERA UTARA



SURAT TELEGRAM

UNIVERSITAS ANDALAS

DAK.

KAPOLDA SUMUT

DERAJAT

KILAT

KEPADA

1. KAPOLTABES MS

KLASIFIKASI

RAHASIA

2. PARA KAPOLRES/TA SIJRN POLDASU

TEMB. 330

1. KAPOLDA SUMUT

2. IRWASDA POLDA SUMUT

3. KASAT RESKRIM POLDA SUMUT

NO. POL

351

VIII - 2009 DIT RESKRIM

TGL. 01-08-2009

REVISI

1. TTK DUA

1. TTK

REKOR

REKOR DIT RESKRIM POLDASU TTN 2009 TTK

2. TTK

REKOR

HSL RAPAT KAPOLDA DAN STAF TGL 01 AGUST 2009 TTK
 PERINTAH PENINDAKAN THOR KSS TP PER 1 AGUST 2009
 DIATUR DI M PSL 301 KUHP TTK

3. TTK

REKOR

STR KAPOLDA NO. POL - STR/345/VII/2009 KMA
 AGUST 2009 TTG PENGIRIMAN HSL PENINDAKAN
 KSS PERJUDIAN DR TGL 01 AGUST 2009 STD 22 AGUST
 TTK

4. TTK

REKOR

STR KAPOLDA NO. POL - STR/345/VI
 AGUST 2009 TTG PENGIRIMAN HSL PERINTAH
 KSS PERJUDIAN DR TGL 01 AGUST 2009 STD 22 AGUST
 TTK

5. TTK

REKOR

STR KAPOLDA NO. POL - STR/350/VIII/2009 KMA
 AGUST 2009 TTG PENGIRIMAN HSL PENINDAKAN
 KSS PERJUDIAN DR TGL 01 AGUST 2009 STD 22 AGUST
 TTK

6. TTK

3 DGN EFF TSD DIATAS DAN ADANYA KOMPLAIN DR SATWA
 SA BISA MENGURAIKAN AP TTP TOK DIMASUKKAN DI DLM TR
 30 SITAHUKAN TTK DUA

7. TTK

REKOR

SETI 301 MENYURIKAN RE
 MINGGIL 10 10 2009 DIAN SETI 301
 08.00 SAMPAL 10.00 10.00 MULAI FAX 2009
 POLDASU 10.00 10.00 TTK

KAT ... KAJI ...
VOL ...
JLPOK ...

DIA TTK VISAMPING MELALUI FAX MENGIRIMKAN SMS KEPD
AKP ASAKHOTTA HLA LGJN NO HP 0812630992

TRGA TTK APABILA TUK ADA LAP STIL PKL 09.00 WIB MAKA
AKAN DILAPKAN NIHIL TTK

CTV TTK STRINIBERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DPO TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLDA SUMUT
DIR RESKRIM
UB

WATER
Drs. EDDY S. YAMBUNAN, MS
AKBP NRP 67080



Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
Jln. MH. Thamrin No. 07 Rantauprapat

LEMBARAN DISPOSISI
NO. POL. : STR. 300 / VIII / 2009 / Reskrim

Paraf / Tanggal 26 Agustus 2009.

CATATAN	KASAT RESKRIM
<p>Hasil peninjauan kasus perjuban</p>	<p><u>M. Lito</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - filekan. - Teruskan pelaporan hasil tuduh dan laporan polisi, agar dilaporkan. <p>16/08/09</p>
KAUR BIN OPS	KANIT
<p><u>Ata Nam. Res</u></p> <p>Harus tindak yudi dgn. laporan polisi. agar di. capur.</p> <p>faelke</p> <p>1/20/09</p>	



SURAT TELEGRAM

1. KAPOLDA SUMUT
2. KAPOLRI MS
3. PARA KAPOLRES / TA STIRN POLDA SUMUT
4. KAGAHESKRIM POLRI
5. GLOPS KAPOLRI
6. KAPOLDA SUMUT
7. IRWASDA POLDA SUMUT
8. KARO OPS POLDA SUMUT
9. KAR INTALKAM POLDA SUMUT
10. KABID PROPAM POLDA SUMUT
11. KABID HUMAS POLDA SUMUT

STR-SSD / VI / 2009 / DIT RESKRIM

TGL 21-08-2009

ASA 1TK

RELI TTK

SATW 1TK RENJA DIT RESKRIM POLDASU THN 2009 TTK

20A 1TK HSL RAPAT KAPOLDA DAN STAF TGL 03-08-2009 TTG PERINTAH
PENINDAKAN THOR KSS TP PERJUJUDIAN SBGMN DIATUR DLM PSI
303 KUHP TTK

21A 1TK DAN REL TSB DIATAS KMA SATWIL YG TELH MELAPKAN HSL PENINDAKAN
KSS TP PERJUJUDIAN DARI TGL 16-08-2009 S/D 22-08-2009 ADLH SBB

1. POLRES BUKIT BARU 1 KMA TSK 4 ORG TTK

2. POLRES BUKIT BARU 1 KMA TSK 38 ORG TTK

3. POLRES Ulu Pandang 2 KMA TSK 13 ORG TTK

EMPAT 1TK POLRES T. NG. TINGGI 1 KSS KMA TSK 3 ORG TTK

5. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 7 ORG TTK

6. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 14 ORG TTK

7. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 9 ORG TTK

8. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 4 ORG TTK

9. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 1 ORG TTK

10. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 1 ORG TTK

11. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 1 ORG TTK

12. POLRES LANGKAT 1 KMA TSK 1 ORG TTK

/TIGA BIS TTK

1000 TTX

